

**ANALISIS PERIMBANGAN PEMBIAYAAN FISKAL
PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH 1993/1994 – 2002
KOTA PEKANBARU**



SKRIPSI

Oleh:

BETRI MAULIDA

No. Mhs : 00313132

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2004**

**ANALISIS PERIMBANGAN PEMBIYAAAN FISKAL
PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH 1993-2002 KOTA
PEKANBARU**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai
derajat Sarjana Strata-1 jurusan Ekonomi Pembangunan pada
Fakultas Ekonomi UII

Oleh :

Nama : Betri Maulida
No. Mahasiswa : 00313132

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2004**

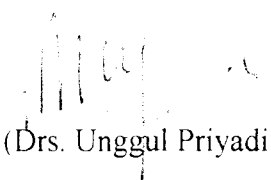
**ANALISIS PERIMBANGAN PEMBIAYAAN FISKAL
PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH 1993/1994 – 2002
KOTA PEKANBARU**

Hasil Penelitian

Disusun oleh : BETRI MAULIDA

No mahasiswa : 00313132

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
Pada tanggal29 Mei 2009...
Dosen Pembimbing,


(Drs. Unggul Priyadi, M.Si)

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

ANALISIS PERIMBANGAN PEMBIAYAAN FISKAL
PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH 1993/1994 – 2002

KOTA PEKANBARU

Disusun oleh : BETRI MAULIDA

No mahasiswa : 00313132

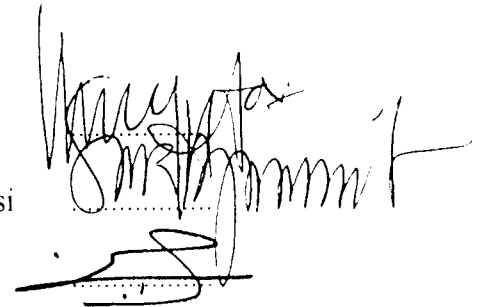
Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan LULUS

Pada Tanggal : 17 juli 2004

Penguji / Pembimbing Skripsi : Drs. Unggul Priyadi, M.si

Penguji I : Dra. Sarastri Mumpuni R, M.si

Penguji II : Priyonggo Suseno, SE.,MA



Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia



Drs. H. Suwarsono, MA

HALAMAN MOTTO

*"dan janganlah kamu bersikap lemah dan jangan (pula) kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman
(Q.S. **Al-Imron**: 139)*

*"(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah-lah hati menjadi tenteram
(Q.S. **Ar-Ra'd**: 28)*

*Ketika ku mohon kepada Allah Kekuatan,
Allah memberiku kesulitan agar aku menjadi kuat
Ketika ku mohon kepada Allah Kebijaksanaan,
Allah memberiku masalah untuk kupecahkan
Ketika ku mohon kepada Allah Kesejahteraan,
Allah memberiku akal untuk berpikir
Ketika ku mohon kepada Allah Keberanian,
Allah memberiku kondisi bahaya untuk kuatasi
Ketika ku mohon kepada Allah Sebuah Cinta,
Allah memberiku orang-orang bermasalah untuk kutolong
Ketika ku mohon kepada Allah Bantuan,
Allah memberiku kesempatan
Aku tidak pernah menerima apa yang kupinta
Tapi...
Aku menerima segala yang aku butuhkan
Doaku terjawab sudah.
"History of prayer"
*Deshinta Arova Dewi**

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya kecil ini kupersembahkan untuk yang tercita dan tersayang :

- ❖ *Papaku Drs. Bachtaruddin dan mama Nurlida*
- ❖ *Adikku yang ganteng Ikhsan Syukri*
- ❖ *My spirit Letda Lek Wahyu Yudha Wibowo*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Pertama dan utama sekali penulis ingin mengucapkan puji syukur atas segala karunia dan nikmat yang telah dilimpahkan oleh Allah SWT, karena atas semua nikmat-Nyalah segala sesuatu ini dimungkinkan. Tak lupa salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Cinta, dedikasi dan bantuan dari banyak oranglah maka penulis dapat menyelesaikan pembuatan skripsi yang berjudul “ANALISIS PERIMBANGAN PEMBIAYAAN FISKAL PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH 1993/1994 – 2002 KOTA PEKANBARU “ sebagai salah satu syarat untuk dapat meraih gelar kesarjanaan pada jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Bahagia sekali saya dapat memberikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Drs. Unggul Priyadi, M.Si, selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya serta atas segala dorongan yang telah diberikan.
2. Bapak Drs.H. Suwarsono ,MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan izin penelitian
3. Bapak Drs. Agus Widardjono, MA selaku ketua jurusan Ekonomi Pembangunan, beserta Bapak-bapak dan Ibu-ibu staf pengajar jurusan Ekonomi Pembangunan dan mas Ismanto yang banyak membantu di bidang akademik
4. Staf Dipenda Kota Pekanbaru yang telah banyak membantu dalam pencarian data, Bang syahyar, SE, M.Ep yang telah membantu mencarikan data di Kantor Dipenda, makasih banget ya bang.
5. Teristimewa untuk kedua orangtuaku, papa dan mama atas segala kasih sayang selama ini dan telah menjadi orangtua yang begitu baik dan senantiasa mendoakan ananda, maaf sedikit mengecewakan karena tidak cumlaude. Buat adikku Ikhwan Syukri, yang serius sekolah!
6. Special dedication Letda Wahyu Yudha tercinta, yang selalu mencintai, memberi memotivasi, membimbing dan mendampingiku serta memberi semangat agar tidak mudah menyerah dalam keadaan sesulit apapun for last two years.

7. Sahabat²ku Rize yusnitawati, makasih dah slalu nemenin aku pergi². ayo skripsi cepat selesin jangan malas2an iceu syg,jgn suka bilang “rize males, bet”, Yessy Yolanda, makasih bgt komputernya ya honey, cepat selesin skripsi,katanya mo nyusul si smile,hehe, Dewi kartiko ningrum, ayo wewi skripsinya cepetan ya, yang tekun. Kalian udah menjadi teman yang baik&ideal selama 4 tahun ini.
8. Sobat²ku : Tantin, Vita Lediastuti, Wika, Tita-Rahmatia(makasih dah jadi teman berbagi),Diah (thnx dah nemeni tennis) Anak² kos Cantiq yang cantik²:rita,anita,djum-vita,achie,m’nely,tya dan Anak2 kos tluki, Sermakar Joko.
9. Dani-iting& ilyas makasih atas bantuan dalam pengerjaan skripsi serta Semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam segi bahasa, materi dan pembahasannya. Maka kritik dan saran yang bersifat membangun demi sempurnanya skripsi ini sangat penulis harapkan. Akhir kata semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak.

Yogyakarta, Juli 2004

Betri Maulida

DAFTAR ISI

Halaman judul	i
Halaman Pengesahan Skripsi	iii
Halaman Persembahan Ujian	iv
Halaman Motto.....	v
Halaman Persembahan	vi
Kata Pengantar	vii
Halaman Daftar Isi	ix
Halaman Daftar Tabel	xiii
Halaman Daftar Gambar	xiv
Halaman Daftar Lampiran.....	xv

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Pembatasan Masalah.....	6
1.6 Hipotesa Penelitian.....	6
1.7 Metode Penelitian.....	7
1.7.1 Metode Pengumpulan Data.....	7

1.7.2	Metode Analisis Data.....	7
1.7.2.1	Derajat Desentralisasi Fiskal.....	8
1.7.2.2	Ketergantungan Pemerintah Daerah	8
1.7.2.3	Derajat Otonomi Fiskal.....	9
1.7.3	Pengujian Ketetapan Model.....	10
1.7.3.1	Koefisien Regresi Serempak.....	10
1.7.3.2	Pengujian Secara Parsial.....	11
1.7.3.3	Koefisien Determinasi.....	12
1.7.4	Pengujian Asumsi Klasik.....	12
1.7.4.1	Uji Multikolinearitas.....	13
1.7.4.2	Uji Heteroskedastisitas.....	14
1.7.4.3	Uji Autokorelasi.....	14
1.8	Sistematika Penulisan Skripsi.....	16

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

2.1	Keadaan Perekonomian Propinsi Riau.....	17
2.2	Geografi Kota Pekanbaru.....	18
2.3	Sejarah Singkat Kota Pekanbaru.....	19
2.4	Pemerintahan Kota Pekanbaru.....	19
2.5	Sosial.....	20
2.6	Pertanian.....	21
2.7	Industri dan Energi.....	21
2.8	Perkembangan Perekonomian Kota Pekanbaru.....	22

2.8.1	Pertumbuhan PDRB.....	23
2.9	Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.....	25
2.9.1	Penerimaan Daerah.....	25
2.9.1.1	Pendapatan Asli Daerah.....	26
2.9.1.2	Sumbangan Dan Bantuan.....	27
2.9.2	Pengeluaran Daerah.....	27
 BAB III KAJIAN PUSTAKA		
3.1	Ria Andriani (2001).....	30
3.2	Sudono Susanto (2001)	33
 BAB IV LANDASAN TEORI		
1.1	Perkembangan Sistem Desentralisasi Fiskal.....	36
1.1.1	Pendapatan Daerah.....	38
1.2	Tujuan Pembiayaan Fiskal Pusat dan Daerah.....	43
1.3	Kebijaksanaan Keuangan Negara.....	44
1.4	Kebijaksanaan Keuangan Daerah.....	45
1.4.1	Penerimaan Daerah.....	46
1.4.1.1	Pendapatan Asli Daerah.....	46
1.4.1.2	Dana Perimbangan.....	46
1.4.1.3	Pinjaman Daerah.....	47
1.4.2	Pengeluaran Daerah.....	47
1.4.2.1	Pengeluaran Rutin Daerah.....	47
1.4.2.2	Pengeluaran Pembangunan Daerah.....	48

1.5	Desentralisasi Fiskal.....	48
1.6	Derajat Otonomi Fiskal Daerah.....	49
1.7	Tingkat Perkembangan Ekonomi.....	49

BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN

5.1	Derajat Desentralisasi Fiskal.....	51
5.2	Analisa Ketergantungan Daerah Kepada Pusat.....	52
5.3	Deskripsi Data.....	52
5.4	Analisis Hasil Regresi.....	55
5.4.1	Hasil Regresi.....	55
5.4.2	Pengujian Statistik.....	56
5.4.2.1	Pengujian Variabel Penjelas Secara Individu....	56
5.4.2.2	Pengujian Variabel Secara Serempak.....	58
5.4.2.3	Koefisien determinasi.....	59
5.5	Pengujian Asumsi Klasik.....	60
5.5.1	Pengujian Multikolinearitas.....	60
5.5.2	Pengujian Autokorelasi.....	61
5.5.3	Pengujian Heteroskedastisitas.....	63
5.6	Pembahasan Hipotesis.....	64

BAB VI KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

6.1	Kesimpulan.....	67
6.2	Implikasi.....	69

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	PDRB dan Pendapatan Perkapita Kota Pekanbaru Atas Harga Konstan Tahun 1995-2000.....	23
Tabel 2.2	Distribusi Persentase PDRB Kota Pekanbaru Atas dasar Harga Berlaku Tahun 1993-1999.....	24
Tabel 2.3	PAD Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 1997/1998 - 1999/2000.....	26
Tabel 2.4	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2002.....	28
Tabel 5.1	data Penelitian Kurun Waktu 1993-2002.....	54
Tabel 5.2	Hasil Regresi Data.....	55
Tabel 5.3	Nilai t hitung Tiap Variabel Bebas.....	58
Tabel 5.4	Hasil Pengujian Multikolinearitas.....	60
Tabel 5.5	Hasil Pengujian Heteroskedastisitas.....	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar. 1.1 Daerah Kritis Uli Durbin-Watson dua sisi.....	15
Gambar 5.1 Pengujian Durbin-Watson.....	62

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1** Surat Izin Penelitian
- Lampiran 2** Data Penelitian kurun waktu 1993-2002
- Lampiran 3** Data Desentralisasi Fiskal Kota Pekanbaru
- Lampiran 4** Data Ketergantungan Pemerintah daerah Terhadap Pemerintah Pusat
- Lampiran 5** Derajat Desentralisasi Fiskal

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Krisis multidimensional yang tengah melanda bangsa Indonesia telah menyadarkan kepada kita akan pentingnya menggagas kembali konsep desentralisasi dan otonomi daerah dalam arti yang sebenarnya. Gagasan penataan kembali sistem otonomi daerah bertolak dari pemikiran untuk menjamin terjadinya efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan demokratisasi nilai-nilai kerakyatan dalam praktik penyelenggaraan Pemerintah Daerah. (Mardiasmo, 2002)

Selama masa Orde Baru, harapan yang besar dari Pemerintah Daerah Untuk dapat membangun daerah berdasarkan kemampuan dan kehendak daerah sendiri ternyata dari tahun ke tahun dirasakan semakin jauh dari kenyataan. Yang terjadi adalah *ketergantungan fiskal dan subsidi serta bantuan Pemerintah Pusat* sebagai wujud ketidakberdayaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Era reformasi saat ini memberikan peluang bagi perubahan paradigma pembangunan nasional dari paradigma pertumbuhan menuju paradigma pemerataan pembangunan secara adil dan berimbang. Perubahan paradigma ini antara lain diwujudkan melalui kebijakan otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diatur dalam satu paket

undang-undang yaitu Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Kebijakan pemberian otonomi daerah dan desentralisasi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah merupakan langkah strategis dalam dua hal. *Pertama*, otonomi daerah dan desentralisasi merupakan jawaban atas permasalahan lokal bangsa Indonesia berupa ancaman disintegrasi bangsa, kemiskinan, ketidakmerataan pembangunan, rendahnya kualitas hidup masyarakat, dan masalah pembangunan sumber daya manusia. *Kedua*, otonomi daerah dan desentralisasi merupakan langkah strategis bangsa Indonesia untuk menyongsong era globalisasi ekonomi dengan memperkuat basis perekonomian daerah. (Bahrul Elmi, 2002)

Dengan berlakunya UU Otonomi Daerah No. 22 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah pada tanggal 1 Januari 2001, maka Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melaksanakan kegiatannya dan menjalankan pembangunan serta kewenangan yang lebih luas dalam mendapatkan sumber-sumber pembiayaan, baik yang berasal dari daerah itu sendiri maupun dana yang berasal dari APBN

Pelaksanaan otonomi daerah yang dimulai January 2001 menimbulkan reaksi yang berbeda-beda bagi daerah. Pemerintah daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar menyambut otonomi daerah dengan

penuh harapan, sebaliknya daerah yang miskin sumber daya alam menanggapi dengan sedikit rasa khawatir dan was-was.

Selain dari PAD, sumber penerimaan pemerintah daerah otonom kabupaten/kota dari Dana Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (PKPD). Dana PKPD adalah salah satu bentuk kebijakan desentralisasi di bidang fiskal yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah.

Ketidakseimbangan fiskal (fiscal imbalance) yang terjadi antara Pemerintah Pusat dan Daerah selama ini telah menyebabkan ketergantungan keuangan Pemerintah Daerah kepada bantuan dari Pemerintah Pusat yang mencapai lebih dari 70 persen kecuali propinsi DKI Jakarta. Dengan terbitnya UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah akan lebih memberikan keleluasaan kepada daerah untuk melaksanakan otonomi dan menjalankan roda pembangunan. Mulai tahun anggaran 2001 diharapkan merupakan tahun awal dari “daerah membangun”. Selain daripada itu, melalui kebijakan tersebut diharapkan akan terjadi pembagian kue nasional yang adil dan rasional. Artinya bagi daerah-daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam akan memperoleh bagian pendapatan yang jumlahnya lebih besar, sedangkan daerah-daerah lainnya akan mengutamakan bagian dari dana alokasi umum dan alokasi khusus. (Bahrul Elmi, 2002)

Untuk meningkatkan keleluasaan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomidaerah dan dsentralisasi fiskal, pemerintah daerah perlu meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Salah satu hal yang perlu dilakukan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kapasitas fiskal dan menutupi kesenjangan fiskal adalah melalui pembenahan manajemen penerimaan daerah. Aspek manajemen penerimaan daerah yang perlu dioptimalkan meliputi manajemen Pendapatan Asli Daerah dan Manajemen Dana Alokasi Umum. Pemerintah daerah memiliki kewenangan yang penuh untuk menggunakan kedua sumber penerimaan tersebut.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan suatu indikator untuk melihat perkembangan berbagai kegiatan ekonomi yang beroperasi di wilayah domestik, tanpa memperhatikan apakah faktor produksinya berasal dari atau dimiliki penduduk setempat. Transaksi ekonomi yang akan dihitung adalah transaksi yang terjadi dalam wilayah suatu daerah dan transaksi yang dilakukan oleh masyarakat dari daerah tersebut.

Sektor-sektor dalam PDRB dikelompokkan atas 3 sektor yaitu : sektor primer, sekunder, dan tersier. Sektor primer terdiri dari sektor pertanian, pertambangan dan penggalian. Yang termasuk sektor sekunder adalah sektor industri, gas dan air serta bangunan. Dan sektor tersier terdiri dari sektor perdagangan, hotel dan restoran, lembaga keuangan, sewa bangunan dan jasa perusahaan dan jasa-jasa. (Bahrul Elmi,2002)

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, yang menjadi fokus penelitian :

1. Bagaimana derajat desentralisasi fiskal Kota Pekanbaru
2. Bagaimana pengaruh Tingkat Perkembangan Ekonomi (laju PDRB harga konstan) X_1 dan bantuan serta Subsidi (X_2) dari Pemerintah Pusat, Variabel rasio tabungan pemerintah daerah dengan belanja pembangunan (X_3) dan pelaksanaan otonomi daerah terhadap derajat otonomi fiskal (Y) Kota Pekanbaru.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian skripsi ini adalah :

1. Untuk menganalisis derajat desentralisasi fiskal Kota Pekanbaru
2. Untuk menganalisis pengaruh ketergantungan pemerintah daerah Kota Pekanbaru terhadap bantuan pemerintah pusat berdasarkan rasio total transfer pemerintah pusat terhadap total penerimaan, laju PDRB harga konstan, rasio tabungan pemerintah daerah terhadap belanja pembangunan berpengaruh terhadap derajat fiskal.

1.4 Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan peneliti adalah:

1. Bagi kepentingan peneliti adalah sebagai wujud penerapan ilmu yang selama ini telah didapatkan pada masa kuliah yang digunakan sebagai

syarat untuk menyelesaikan jenjang Strata-1 (S1) di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia

2. Sebagai bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk pengambilan keputusan atau kebijakan yang berkaitan dengan perimbangan biaya fiskal.
3. Memperkaya penelitian sejenis yang telah ada dan dapat digunakan sebagai perbandingan penelitian berikutnya.

1.5 Pembatasan Masalah

Dalam permasalahan ini agar penelitian tidak menjadi luas maka dibatasi dengan hal-hal sebagai berikut :

1. Pengaruh derajat desentralisasi fiskal Kota Pekanbaru
2. Untuk menganalisis faktor yang berpengaruh terhadap derajat otonomi fiskal Kota Pekanbaru.

1.6 Hipotesa Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahannya dapat diajukan beberapa hipotesa. Hipotesa ini merupakan jawaban sementara dari permasalahan dan tidak terlepas dari kerangka teori yang terkait.

1. Untuk menjawab tujuan pertama tidak digunakan hipotesis secara eksplisit karena bersifat deskriptif.
2. Untuk tujuan kedua hipotesis yang diajukan adalah derajat otonomi fiskal secara bersama-sama dipengaruhi oleh Tingkat Perkembangan Ekonomi (laju PDRB harga konstan) X_1 dan bantuan serta Subsidi (X_2) rasio

tabungan pemerintah daerah dengan belanja pembangunan (X_3) *Dummy* (D) variabel sebelum otonomi daerah dan sesudah otonomi daerah.

3. Secara parsial hipotesanya adalah tingkat perkembangan ekonomi (Laju PDRB harga konstan) berpengaruh negatif .
4. Variabel bantuan berpengaruh positif terhadap derajat otonomi fiskal.
5. Variabel rasio tabungan berpengaruh signifikan dan positif derajat fiskal daerah.
6. *Dummy* (D) berpengaruh signifikan positif adalah variabel sebelum otonomi daerah dan sesudah otonomi daerah.

1.7. Metode Penelitian

1.7.1 Metode Pengumpulan Data

Dalam menyusun skripsi ini metode yang ditempuh untuk mendapatkan data adalah melalui pencatatan angka-angka dan data sekunder tentang keuangan daerah yang diterbitkan oleh kantor Biro Pusat Statistik maupun Dipenda serta Bappeda Kota Pekanbaru. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penerimaan Asli Daerah, tabungan pemerintah, Bantuan atau Subsidi, APBD serta PDRB.

1.7.2 Metode Analisis Data

Pencapaian tujuan penelitian dan pengujian hasil penelitian digunakan dua alat yaitu analisis kuantitatif dan analisis deskriptif. Analisis kuantitatif yaitu analisis yang menggunakan rumus – rumus dan teknik perhitungan yang dapat digunakan untuk menganalisa masalah – masalah yang diteliti.

1. Derajat Desentralisasi Fiskal

Derajat Desentralisasi Fiskal pemerintah pusat dan daerah dapat dianalisa dengan menggunakan metode analisa rasio yaitu dengan membandingkan antara nilai PAD dengan TPD (PAD/TPD), PPD dengan TPD (PPD/TPD) dan B dengan TPD (B/TPD). (Arditho binadi, 11:97)

Keterangan :

PAD = Pendapatan Asli Daerah

TPD = Total Penerimaan Daerah

PPD = Pajak Pemerintah yang diserahkan kepada daerah

B = Bantuan serta subsidi pemerintah pusat

$TPD = PAD + PPD + B$

Kriteria besarnya derajat desentralisasi fiskal terbukti jika hasil perhitungan dengan persamaan di atas berada di bawah 50% atau kurang dari 50% yang berarti derajat desentralisasi fiskal dikatakan rendah, tidak terbukti jika hasil dan perhitungan tersebut di atas 50%.

2. Ketergantungan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah Pusat

Analisa yang digunakan untuk menguji hipotesa ini adalah Dengan membandingkan antara pendapatan daerah sendiri dengan APBD

($PDS/APBD$). (Ardhito Binadi, 11 :1997).

Keterangan :

PDS = Pendapatan Daerah Sendiri ($PAD + PBB$)

APBD = Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ($PAD + PBB + Bantuan$)

Jika dari perhitungan tersebut hasilnya berada di atas 50% maka dikatakan tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat rendah. Bila hasil perhitungan berada di bawah 50% maka tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat tinggi.

3. Derajat Otonomi Fiskal

Untuk mengetahui analisis tingkat ketergantungan pemerintah daerah kota Pekanbaru terhadap pemerintah pusat digunakan analisis regresi seperti berikut :

$$Y = f(X_1, X_2, X_3)$$

Untuk mencapai tujuan penelitian ini dan menguji hipotesa maka digunakan persamaan linear sebagai berikut :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 D$$

Keterangan :

Y = Rasio antara PAD dengan APBD tanpa adanya subsidi dari pemerintah pusat (%) (derajat otonomi fiskal)

β_0 = Konstanta

X_1 = Tingkat perkembangan ekonomi yaitu laju pertumbuhan PDRB (%)

X_2 = Rasio total transfer pemerintah pusat terhadap penerimaan APBD(%)

X_3 = Rasio tabungan pemerintah terhadap belanja pembangunan (%)

D = Variabel dummy

$D = 0$, sebelum otonomi daerah

$D = 1$, sesudah otonomi daerah

$B_1 =$ Koefisien regresi dari X_1

$\beta_2 =$ Koefisien regresi dari X_2

$\beta_3 =$ Koefisien regresi dari X_3

$\beta_4 =$ Koefisien regresi dari D

1.7.3 Pengujian Ketetapan Model

Pengujian bertujuan untuk mengetahui suatu model dapat digunakan untuk menduga parameter – parameter dalam persamaan. Pengujian ketetapan model dilakukan dengan melakukan.

1.7.3.1 Uji F (Koefisien Regresi secara serempak)

Uji F yaitu dengan membandingkan nilai F hitung dengan nilai F tabel pada derajat kebebasan tertentu. Hipotesa yang diajukan :

$H_0 = \beta_0 = \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = D = 0$; tidak ada pengaruh yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama

$H_a = \beta_0 \neq \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq D \neq 0$; ada pengaruh signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama

Langkah pengujian secara serempak hampir sama dengan pengujian secara parsial yaitu dengan membandingkan nilai hitung terhadap nilai tabel., dalam hal ini yang digunakan adalah F hitung dibandingkan dengan nilai F tabel. Adapun cara mencari nilai F tabel

adalah dengan mencari derajat bebas *numerator* ($k-1$) dan derajat bebas *denominator* ($n-k$). Apabila $F\text{-hitung} > F\text{-tabel}$, maka H_0 ditolak berarti secara bersama – sama *variabel independen* secara signifikan mempengaruhi *variabel dependen*.

Apabila $F\text{-hitung} < F\text{-tabel}$, maka H_0 diterima berarti secara bersama – sama *variabel independen* secara signifikan tidak mempengaruhi *variabel dependen*.

1.7.3.2 Pengujian Secara Parsial (Uji t)

Pengujian secara parsial dimaksudkan dengan menggunakan uji t statistik satu sisi terhadap masing-masing variabel bebas, untuk mengetahui apakah ada atau tidaknya pengaruh variabel – variabel penjelas terhadap variabel tidak bebasnya secara individual.

Hipotesa yang digunakan :

$H_0 : \alpha = 0$, maka variabel independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependennya.

$H_a : \alpha > 0$, maka variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependennya.

Kriteria Pengujian :

- Apabila digunakan uji statistik t satu arah

Jika $t\text{ hitung} > t\text{-tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Jika $t\text{ hitung} < t\text{-tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak

Bila H_0 ditolak berarti variabel *independen* yang bersangkutan secara signifikan berpengaruh terhadap *dependennya*. Dan sebaliknya jika

H_0 diterima maka variabel *independen* yang bersangkutan secara tidak signifikan berpengaruh terhadap *dependemnya*.

1.7.3.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Dimaksudkan untuk melihat kebaikan suatu garis regresi yang dicocokkan terhadap sekumpulan data koefisien determinasi majemuk (Multiple Coefisien of Determinant) merupakan ikhtisar yang menyatakan seberapa baik garis regresi sampel mencocokkan data. Secara verbal, R^2 mengukur proporsi atau prosentase total variasi dalam Y yang dijelaskan oleh model regresi.

R^2 merupakan besaran positif. Batasnya adalah $0 < R^2 < 1$. Suatu R^2 sebesar satu (1) berarti suatu kecocokan sempurna, sedangkan R^2 yang nilai nol (0) berarti tidak ada hubungan antara *independen* variabel dengan *dependen* variabel.

$R^2 = 1$ berarti bahwa garis regresi yang dicocokkan menjelaskan 100% variasi dalam Y. Sebaliknya $R^2 = 0$ maka tidak menjelaskan sedikitpun variasi dalam Y tetapi kelas R^2 terletak antara kedua ekstrim ini. Kecocokan model ini akan lebih baik jika R^2 semakin mendekati satu (1).

(Damodar gujarati, 1991)

1.7.4 Pengujian Asumsi Klasik

Pengujian ini untuk melihat apakah model yang diteliti terkena penyimpangan klasik atau tidak. Maka pengadaan pemeriksaan terhadap penyimpangan klasik tersebut harus dilakukan asumsi yang harus dipenuhi dalam penggunaan metode OLS adalah asumsi klasik sebagai berikut :

1. E_i merupakan variabel random dan mengikuti distribusi normal

$$\text{dengan kesalahan} = \sum E_i = 0$$

2. Varian bersyarat dari E_i adalah konstan atau homoskedastisitas
3. Tidak ada autokorelasi
4. Tidak ada multikolinear

Dari asumsi tersebut cukup menguji tiga asumsi diantaranya yaitu Multikolinearitas, Heteroskedastisitas, dan Autokorelasi.

1.7.4.1 Multikolinearitas

Pengujian terhadap multikolinearitas dapat dilakukan dengan menguji keterkaitan antar variabel independen dilakukan dengan melihat R^2 , nilai t, nilai F. Multikolinearitas merupakan suatu keadaan dimana satu atau lebih variabel independen dinyatakan sebagai kombinasi linear variabel independen lainnya. Salah satu langkah untuk mengetahui adanya multikolinear adalah dengan langkah pengujian terhadap masing-masing variabel independen. Untuk mengetahui seberapa korelasinya (R^2 variabel) yang didapat kemudian dibandingkan dengan R^2 yang didapat dari hasil regresi secara bersama variabel independen. Jika diperoleh antara R^2 variabel yang melebihi R^2 pada model regresi maka model regresi tersebut terdapat multikolinearitas dan sebaliknya apabila R^2 lebih besar dari R^2 variabel maka ini menunjukkan tidak terdapatnya multikolinearitas pada model persamaan yang teruji.

1.7.4.2 Heteroskedastisitas

Suatu asumsi kritis dari model regresi linear klasik adalah bahwa gangguan U_i semuanya mempunyai varian sama, jika asumsi ini tidak terpenuhi akan terjadi heteroskedastisitas. Konsekuensi sebagai akibat adanya heteroskedastisitas, maka pemeriksa OLS masih tetap tidak bias dan konsisten akan tetapi tidak lagi efisien baik untuk sampel kecil maupun sampel besar, karena variannya tidak minimum. Pengujian terhadap heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan pengujian *park*. Uji *park* dilakukan dengan membandingkan antar nilai t tabel dengan t hitung. Perhatikan nilai t statistik, apabila signifikan berarti terdapat heteroskedastisitas.

1.7.4.3 Autokorelasi

Autokorelasi adalah korelasi atau hubungan yang terjadi diantara anggota-anggota rangkaian pengamatan yang tersusun dalam rangkaian waktu. Untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi ini dapat dilakukan dengan menggunakan uji Durbin Watson Statistik (DW-Test) yaitu dengan menempatkan nilai d statistik kedalam daerah autokorelasi yang disusun setelah mengetahui nilai dL serta dU , nilai mekanisme DW tersebut adalah:

$0-dL$ = daerah autokorelasi positif

$dL-dU$ = daerah keragu-raguan

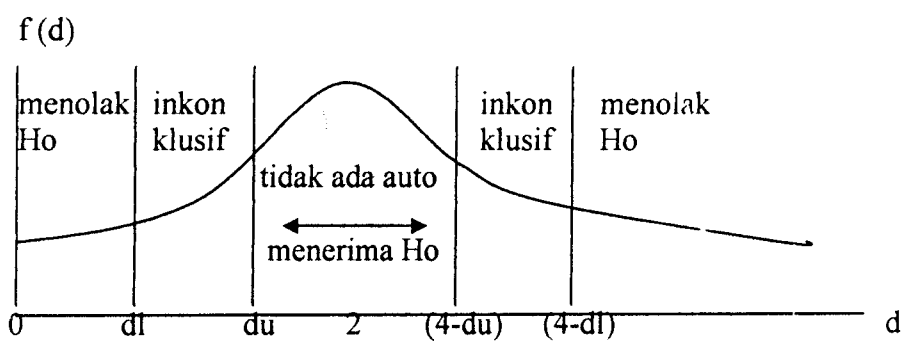
$dU-(4-dU)$ = daerah tidak ada autokorelasi

$(4-dL)-(4-dU)$ = daerah autokorelasi negatif

Secara grafik dapat digambarkan sebagai berikut

Gambar 1.1

Daerah kritis uji Durbin Watson dua sisi



Keterangan :

H_0 : ada autokorelasi positif

H_a : ada autokorelasi negatif

1.8 Sistematika Penulisan

- BAB I** :**PENDAHULUAN**, berisi uraian mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, hipotesis, metodologi penelitian dan sistematika penulisan skripsi.
- BAB II** :**GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN**, berisi gambaran mengenai kondisi perekonomian Kota Pekanbaru.
- BAB III** :**KAJIAN PUSTAKA**, berisi uraian mengenai gambaran penelitian yang dilakukan sebelumnya untuk melandasi teori dan penelitian
- BAB IV** :**LANDASAN TEORI**, berisi teori yang sesuai dan melandasi penelitian sehingga dapat mendukung penelitian yang dilakukan.
- BAB V** :**ANALISIS DAN PEMBAHASAN**, menjelaskan rangkaian kegiatan yang mendukung obyek yang akan diteliti dan data yang telah dikumpulkan.
- BAB VI** :**KESIMPULAN DAN IMPLIKASI**, berisi mengenai uraian kesimpulan dan implikasi yang dapat penulis ajukan sehubungan dengan penelitian yang telah dilakukan

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

2.1 Keadaan Perekonomian Propinsi Riau

Menjelang berakhirnya Pelita VI kondisi sosial ekonomi daerah Riau pada umumnya memang cukup baik, antara lain ditunjukkan oleh laju pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi yaitu 8,89 % pada tahun 1996. Kondisi ini semakin membaik dengan meningkatnya Indeks Mutu Hidup 80 % pada tahun 1996 tersebut, semakin berkurangnya jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan (9,92 %) serta semakin meratanya pelaksanaan pembangunan di seluruh pelosok pedesaan. Namun, sejak pertengahan 1997 – juga terjadi secara nasional- Riau menghadapi berbagai permasalahan yang sangat serius, sehingga laju pertumbuhan ekonomi mengalami kemerosotan total, menjadi 6,91% (1997) dan 1,79 % (1998), bahkan bila dikeluarkan Kota Batam akan menjadi minus 5,4%.

Menghadapi abad 21 yang antara lain akan terjadi persaingan amat ketat, terutama dengan diberlakukannya pasar bebas, tidak ada pilihan lain, daerah Riau harus membelah diri menjadi dua bagian konsentrasi. *Bagian pertama*, adalah menuntaskan berbagai permasalahan yang ditinggalkan rezim sebelumnya, antara lain adalah kemiskinan dan masih adanya sejumlah desa yang notabene masih tertinggal, masih rendahnya kualitas tenaga kerja dan masih belum kuatnya berbagai institusi yang ada ditengah-tengah masyarakat. *Bagian kedua*, Riau

tidak boleh ragu-ragu memasukkan dirinya di tengah-tengah proses globalisasi, yang antara lain ditandai dengan majunya pertumbuhan industrialisasi.

2.2 Geografi Kota Pekanbaru

Letak Kota Pekanbaru secara geografis antara $101^{\circ} 14$ menit sampai $101^{\circ} 34$ Bujur Timur dan antara $0^{\circ} 25$ menit sampai 45° menit Lintang Utara dengan ketinggian 50 meter diatas permukaan laut. Adapun Kota Pekanbaru bersepadan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar di sebelah Utara, disebelah Barat dengan Kabupaten Kampar, sebelah Timur dengan Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Kampar. Luas kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1987 adalah seluas 446,5 Km², kemudian berdasarkan hasil pengukuran Tim Badan Pertanahan Nasional luasnya bertambah menjadi 632,26 Km². Wilayah Kota Pekanbaru dialiri Sungai Siak yang merupakan pintu gerbang pelayaran ke luar dan ke dalam Propinsi Riau termasuk pintu gerbang ke beberapa negara negara seperti Singapura dan Malaysia.

Wilayah Kota Pekanbaru keadaannya relatif merupakan daerah datar dan memiliki struktur tanah *aluvial hydromorf* dengan pasir di daerah perkotaan, dan di daerah pinggirannya terdiri atas jenis *organosol* dan *humus*. Kota ini dibelah oleh sungai siak yang mengalir dari barat ke timur dan merupakan sungai yang cukup dalam dengan rata-rata kedalaman sampai 10 meter. Sungai ini mempunyai anak sungai antara lain : Sungai Umban Sari, Air Hitam, Sibam, Sekutul, Pengambang, Ukai, Sago, Senapelan, Limau, Tampan dan Sungai Sail. Dengan kelembaban antara 92% sampai dengan 96% dan kelembaban minimum 56% sampai 67%, maka Kota Pekanbaru adalah daerah tropis dengan suhu udara

berkisar 29-33⁰ C. dengan dua musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau yang terjadi pada bulan Maret sampai Agustus untuk musim kemarau dan bulan September sampai Februari untuk musim hujan dengan curah hujan antara 2000-3000 mm, dan tekanan udara berkisar antara 1006.1-1013.4 milibar dengan kecepatan angin berkisar antara 7-12 mil per jam.

2.3 Sejarah Singkat Kota Pekanbaru

Pada awalnya Kota Pekanbaru adalah berupa kawasan dusun dengan nama Payung Sekaki yang terletak dipinggiran Sungai Siak, suku yang paling lama atau yang membuka kawasan dusun Payung Sekaki adalah Suku Senapelan yang kemudian dikenal sebagai dusun Senapelan. Pada periode Tahun 1500 an seiring dengan putusya hubungan antara Kerajaan Malaka dengan Riau Daratan, Kerajaan Riau Daratan (Gasib) mengambil alih kekuasaan termasuk dusun senapelan. Sampai pada saat kekuasaan Raja Muda Ali, dusun senapelan baru dihidupkan kembali. Pada saat bergabung dengan Pemerintahan RI, Kota Pekanbaru bukan merupakan pusat pemerintahan, melainkan pusat pemerintahan terletak di Kepulauan Riau (Tanjung Pinang). Sedangkan Kota Pekanbaru masih berstatus keresidenan. Baru pada Tahun 1959 sesuai dengan SK Mendagri No Des.52/1/44/44-25 tanggal 25 agustus 1959 berstatus Kotamadya.

2.4 Pemerintahan Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru sebagai wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II dengan dasar hukum dekosentrasi wilayah adalah UU No 5 tahun 1974, pada awalnya memiliki 8 Kecamatan, ke 8 Kecamatan ini meliputi 40 kclurahan dan 9 desa (PP No 19 Tahun 1987), sejak tahun 1997, 9 desa yang dulunya merupakan desa

berubah status menjadi kelurahan. Sekarang sesuai dengan UU No. 22 tahun 2000, nama Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru berubah menjadi Kota Pekanbaru dengan 8 Kecamatan dan 49 Kelurahan dan jumlah penduduk tahun 2000 berkisar 752.700 jiwa (tingkat pertumbuhan penduduk sebesar 6%/ tahun). Dengan tingkat kepadatan sebesar 1190 penduduk/ km² memiliki suku yang mendiami wilayah Kota Pekanbaru beranekaragam (heterogen), tetapi akar sosial budayanya adalah Melayu Riau.

Sampai saat ini telah ada 13 Walikota yang memimpin Kota Pekanbaru sejak masa awal kemerdekaan sampai sekarang yaitu : Datuk Wan Abdulrahman, Datuk Wan Ahmad, Tengku Ilyas, Muhammad Yunus, OKN. Jamil, Datuk Wan Abdul Rachman, Tengku Bay, Raja Rusli,BA., Abdul Rachman Hamid, H. Ibrahim Arsyad SH., Drs.Farouq Alwi, H. Oesman Effendi Affan SH, dan H. Herman Abdullah MM sebagai Walikota terakhir yang memimpin Kota Pekanbaru dengan jumlah penduduk 752.700 jiwa yang terdiri dari 385.846 laki-laki dan 366.854 perempuan.

2.5 Sosial

Sektor pendidikan Kota Pekanbaru telah maju pesat baik yang dikelola pemerintah maupun swasta, tercatat pada tahun 1998 sebanyak 93 sekolah Taman Kanak-kanak, 244 Sekolah Dasar, 54 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, 30 Sekolah Menengah Umum, 2 Universitas Negeri dan 15 Perguruan Tinggi Swasta. Hal ini diikuti oleh sektor kesehatan, dengan meningkatnya jumlah pelayanan kesehatan yang dikelola oleh pemerintah tapi peningkatan jumlah pelayanan kesehatan lebih besar yang dikelola pihak swasta. Rumah Sakit tercatat

sebanyak 11 uni, 20 unit rumah bersalin, 13 puskesmas, 31 puskesmas pembantu, dan 18 balai pengobatan yang didukung oleh tenaga medis sebanyak 1223 orang.

2.6 Pertanian

Lahan yang digunakan untuk sektor pertanian cukup besar yaitu 61.893 ha baik untuk sawah, ladang, kebun, tambak, kolam dan kegunaan pertanian lainnya. Lahan ini digunakan untuk tanaman sayur kangkung seluas 248 ha yang menghasilkan sayur kangkung sebanyak 4.890 ton/tahun dan menghasilkan 535.6 ton/ tahun bayam. Demikian juga dengan tanaman buah-buahan yang didominasi oleh buah rambutan dengan Produksi 2069 ton/tahun dan pisang sebesar 241 ton/tahun.

Pada sektor peternakan, sapi yang dipotong pada tahun 1998 sebanyak 3.132 ekor dan kerbau sebanyak 2.219 ekor, sedangkan babi untuk dipotong dalam tahun 1998 adalah sebanyak 3959 ekor. Untuk produksi daging ayam ras sebanyak 4.828.374 kg dengan jumlah telur 22.433.400 butir, ayam buras sebanyak 394.134 kg dan telur 6.532.596 butir, sedangkan itik sebanyak 9.559 kg dan telur 1.355.702 butir. Untuk produksi ikan dari berbagai jenis mencatat angka 1.029.450 kg yang dihasilkan pada tahun 1998. tapi udang hanya mencatat nilai kecil dalam produksinya yaitu sebesar 235 kg. Penjualan ikan di pasar lebih banyak didatangkan dari daerah Sumatera Barat dan Kota Dumai.

2.7 Industri Dan Energi

Sektor industri kecil mengalami peningkatan menjadi 2.376 pada tahun 2000 dari 2.340 pada tahun 1999, sedangkan perusahaan berskala besar dan sedang berjumlah 35 buah. Perusahaan besar ini lebih banyak bergerak di

industri kayu dan turunannya, perkebunan sawit, industri makanan dan minuman serta industri kertas dan barang dari kertas. Untuk mendukung jalannya kegiatan industri tersebut, PLN Kota Pekanbaru telah memproduksi tenaga listrik sebesar 28.559.462 Kwh, walaupun paling banyak digunakan untuk rumah tangga, tetapi untuk kegiatan industri menempati urutan kedua dalam penggunaan listrik, diikuti oleh perhotelan.

2.8 Perkembangan Perekonomian Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru sebagai ibukota Propinsi Riau , masih beruntung pada saat terjadinya krisis ekonomi , karena masih mampu bertahan dan mencapai laju pertumbuhan ekonomi “plus” pada tahun 1997 walaupun rendah 9,26 % setelah Kota Batam yang 11,42 %. Tapi pada tahun 1998 jauh merosot menjadi 2,97 %, dengan segala kekurangannya, pelaksanaan pembangunan sampai dengan pertengahan 1997 telah menunjukkan keberhasilan.

Perkembangan perdagangan ekspor impor diikuti juga oleh perkembangan pendapatan regional. Berdasarkan perhitungan Produk Domestik Regional Bruto menunjukkan bahwa ada beberapa sektor yang mempunyai peranan dominan dan memberikan kontribusi yang cukup besar , salah satunya adalah sektor perdagangan sebesar 39,17 % , kemudian sektor perhubungan sebesar 21,24 %, perbankan 10,55 %, perumahan 8,37 %, dan industri sebesar 6,35%. Sehingga sangat beralasan apabila Pemerintah Kota Pekanbaru mengambil kebijakan pembangunan yang mengarahkan Kota Pekanbaru menjadi Kota Industri dan Perdagangan seperti Kota Batam yang telah lebih dahulu maju menjadi salah satu

kawasan industri dan perdagangan di jalur perdagangan Internasional atau yang lebih dikenal dengan Sijori (Singapura Johor Riau).

Tabel 2.1
PENDAPATAN DOMESTIK REGIONAL BRUTO DAN PENDAPATAN
PER KAPITA KOTA PEKANBARU ATAS HARGA KONSTAN
TAHUN 1995 S/D 2000

tahun	PDRB	Pendapatan Per kapita
1995	953.450,92	1.686.204,02
1996	1.044.558,69	1.693.144,46
1997*	1.183.721,31	2.126.419,40
1998*	1.154.365,53	1.993.844,15
1999*	1.135.287,66	1.873.218,19
2000**	1.322.723,55	2.097.377,71

Sumber : Biro Pusat Statistik

Catatan : * Angka diperbaiki

* Angka sementara

2.8.1 Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto adalah untuk mengetahui tingkat produk yang dihasilkan oleh seluruh faktor produksi, besarnya laju pertumbuhan ekonomi dan struktur perekonomian pada satu periode di suatu daerah tertentu. Laju pertumbuhan ekonomi dapat diketahui jika data PDRB dikaji dari sudut perbandingan besaran (nilai) atas dasar harga konstan, sedangkan struktur

ekonomi dapat dilihat dari besarnya sumbangan masing-masing sektor ekonomi terhadap total PDRB.

Table 2.2
Distribusi Persentase PDRB Kota Pekanbaru
Atas Dasar Harga Berlaku 1993-1999

Sektor	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Pertanian	1,27	1,33	1,29	1,22	1,14	1,19	1,19
2. Pertambangan dan Penggalian	0,05	0,06	0,07	0,08	0,08	0,07	0,07
3. Industri Pengolahan	8,98	9,14	9,16	9,35	8,94	7,48	7,48
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	2,81	2,73	2,73	2,76	2,52	2,21	2,21
5. Bangunan	11,72	12,79	12,89	13,66	13,14	11,96	11,96
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	26,08	25,23	25,35	25,85	23,90	20,73	20,73
7. Angkutan dan Komunikasi	13,30	13,68	13,96	14,09	13,51	13,07	13,07
8. Keuangan, Sewa & Jasa Perusahaan	20,90	20,93	21,25	20,19	23,02	29,12	29,12
9. Jasa-jasa	14,90	14,09	13,31	12,81	13,74	14,18	14,18
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Jika dilihat secara sektoral pada tahun 1998 sektor keuangan, persewaan, jasa perusahaan mempunyai kontribusi terbesar 29,12 persen, kemudian sektor perdagangan, hotel dan restoran yaitu 20,73 persen, sektor jasa-jasa 14,18 persen, sedangkan sektor-sektor lain yang mempunyai kontribusi diatas 7 persen masing-masing sektor industri 7,48 persen, bangunan 11,96 persen dan angkutan dan komunikasi 13,07 persen. Kemudian pada tahun 1999, kontribusi sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan 15,98 persen, sektor perdagangan, hotel dan restoran masih cukup besar yakni 26,29 persen dan jasa-jasa sebesar 16,67 persen. Kemudian sektor-sektor yang mempunyai kontribusi diatas 7

persen masing-masing sektor industri 7,57 persen, bangunan 14,60 persen, angkutan dan komunikasi 14,70 persen.

Untuk menghitung Produk Domestik Regional Bruto dapat berdasarkan harga berlaku dan dapat juga harga konstan, PDRB berdasarkan harga berlaku merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh unit produksi pada periode tertentu dan nilainya dipengaruhi oleh tingkat inflasi pada tahun yang bersangkutan. PDRB berdasarkan harga konstan menggambarkan pertumbuhan volume produksi dimana perubahan harga dipengaruhi inflasi dihilangkan dengan menggunakan harga pada tahun dasar tertentu. PDRB berdasarkan harga konstan dapat dipergunakan untuk melihat perubahan pertumbuhan ekonomi daerah dari tahun ke tahun.

2.9 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

2.9.1 Penerimaan Daerah

Keuangan daerah dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya serta dalam melaksanakan otonomi daerah. Disini keuangan daerah menduduki posisi yang sangat penting guna menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah dan akan dilaksanakan pemerintah daerah sehingga dapat melaksanakan fungsinya secara efektif dan efisien.

Secara garis besar sumber pendapatan daerah diatur dalam UU No 34 tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi daerah. Undang-undang tersebut merupakan perubahan atau perbaikan atas Undang-undang No. 18 Tahun

1997 terdiri dari Pajak daerah, Retribusi, dan bagian Laba Perusahaan Daerah (BUMD).

2.9.1.1 Pendapatan Asli daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang berasal dari sumber-sumber pendapatan yang terdiri dari retribusi, bagian laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), penerimaan lain-lain. Berikut ini pendapatan asli daerah Kota Pekanbaru Tahun anggaran 1997/1998-1999/2000

Table 2.3
Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru
Tahun Anggaran 1997/1998- 1999/2000
(dalam ribuan rupiah)

No	Pendapatan Asli Daerah	1997/1998	1998/1999	1999/2000
1.	Pajak daerah	3.714.699	4.389.625	7.900.613
2.	Retribusi daerah	6.305.169	3.100.902	3.985.650
3.	Laba BUMN	85.705	82.070	117.238
4.	Penerimaan lain-lain	207.266	1.839.272	791.423
	Total PAD	10.312.981	9.411.869	12.794.926

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa PAD tahun 1997/1998 sebesar Rp 10.312.918.000 pada tahun 1998/1999 sebesar Rp 9.411.869.000 dan pada tahun 1999/2000 sebesar Rp 12.794.926.000.

sumbangan PAD tersebut terbesar diperoleh dari pajak daerah dan retribusi daerah.

Sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, Pajak Daerah merupakan sumber pendapatan yang terbesar dibandingkan dengan jenis pendapatan yang berasal dari retribusi, bagian laba BUMD, dan pendapatan asli daerah lainnya. Sebelum terbitnya UU No. 18 Tahun 1997, pajak daerah mencapai 50 jenis, walaupun realisasinya penerimaannya hanya 8 sampai 12 jenis pajak saja. Semua peraturan daerah mengenai pajak harus mendapat persetujuan dari Departemen Dalam Negeri, dan dalam beberapa hal Departemen Dalam Negeri yang menetapkan besar tarif pajak.

2.9.1.2 Sumbangan dan Bantuan

Sumbangan adalah pendapatan daerah yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah propinsi serta sumbangan lain yang diatur dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan bantuan adalah semua jenis bantuan atas inpres yang diperuntukkan bagi pemerintah daerah kabupaten baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah propinsi.

2.9.2 Pengeluaran Daerah

Pengeluaran daerah tercemin dalam APBD yaitu pengeluaran yang dibiayai oleh sumber pendapatan asli daerah, subsidi daerah otonomi dan subsidi pemerintah daerah untuk pembangunan.

Tabel 2.4
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Pekanbaru
Tahun Anggaran 2002
 (dalam juta rupiah)

No	Pengeluaran Daerah	Jumlah
1.	Pengeluaran rutin	248.514,66
	a. belanja pegawai	141.825,71
	b. belanja barang	62.795,30
	c. belanja pemeliharaan	11.286,69
	d. belanja perjalanan dinas	3.521,69
	e. belanja lain-lain	20.308,19
	f. pembiayaan pokok dan bunga pinjaman	122,83
	g. pensiun dan bantuan	0,00
	h. subsidi/ bantuan kepada daerah bawahan	450,00
	i. pengeluaran tidak termasuk bagian lain	7.996,60
	j. pengeluaran tidak tersangka	207,73
2	Pengeluaran pembangunan	115.505,77
	Total pengeluaran	364.020,42

Belanja rutin daerah adalah bagian dari anggaran belanja dan pendapatan daerah (APBD) untuk membiayai program kerja pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemberian pelayanan kepada masyarakat. Dengan kata lain belanja rutin adalah dana yang disediakan untuk membiayai kegiatan operasional pemerintah daerah supaya dapat menjalankan tugas-tugasnya dalam masa satu tahun anggaran (Bachrul elmi : 2002). Jumlah dana anggaran keperluan rutin akan banyak dipengaruhi oleh kemampuan daerah dalam pengalokasian sumber-sumber dana dihadapkan dengan kebutuhan nyata pembiayaan tugas umum pemerintah daerah dan

pemberian pelayanan kepada masyarakatnya. Berdasarkan hasil kajian empiris tampak bahwa anggaran rutin merupakan salah satu fungsi dari kenaikan pendapatan daerah. Artinya jumlah anggaran rutin akan mengalami kenaikan apabila pendapatan daerah meningkat. Belanja pembangunan adalah belanja modal yaitu kegiatan proyek yang bersifat *non recurring capital expenditures* yang menyelesaikannya dalam periode waktu tertentu biasanya sampai enam tahun (Elmi Bachrul,2002). Pengeluaran pembangunan daerah merupakan investasi daerah yang diklarifikasikan berdasar sektor demi sektor yang mencerminkan kegiatan masyarakat daerah.

BAB III

KAJIAN PUSTAKA

3.1 Ria Andriani (2001)

Sebagai bahan rujukan dalam penelitian ini, diperlukan suatu penelitian empiris yang dilakukan sebelumnya. Berkaitan dengan materi penelitian, studi yang sebelumnya dilakukan Ria Andriani mengenai “ Analisis Kemampuan Daerah Kabupaten IndraGiri Hulu Propinsi Riau Dalam Kemandirian Pembiayaan Daerah Menyongsong Implementasi UU No. 25 Tahun 1999 “. Tujuan dari penelitian yang dilakukan Ria Andriani adalah untuk menganalisis kemampuan dan kemandirian Kabupaten Indragiri Hulu dalam pembiayaan daerah dan untuk menganalisis tingkat ketergantungan pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hulu terhadap bantuan pemerintah pusat berdasarkan rasio total transfer pemerintah pusat terhadap total penerimaan, laju PDRB harga konstan, rasio tabungan pemerintah daerah terhadap belanja pembangunan berpengaruh terhadap derajat fiskal. Untuk menjawab tujuan lainnya yaitu tentang tingkat ketergantungan pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hulu terhadap pemerintah pusat digunakan analisis regresi sebagai berikut (*Ria Andriani : 2001*):

$$Y = f(X_1, X_2, X_3)$$

Untuk mencapai tujuan penelitian ini dan menguji hipotesa maka digunakan persamaan linear sebagai berikut :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan :

Y = Derajat fiskal daerah yang diperoleh dengan menggunakan rasio antara PAD dengan total penerimaan APBD tidak termasuk transfer dari pemerintah pusat

β_0 = Konstanta

X_1 = Rasio total transfer dari pemerintah pusat terhadap penerimaan APBD

X_2 = Tingkat perkembangan ekonomi yaitu laju PDRB berdasar harga konstan

X_3 = Rasio tabungan Pemerintah Daerah dengan belanja pembangunan

β_1 = Koefisien regresi dari X_1

β_2 = Koefisien regresi dari X_2

β_3 = Koefisien regresi dari X_3

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah .

1. Kabupaten Indragiri Hulu sangat tergantung dengan adanya bantuan dan sumbangan dari pemerintah pusat. Proporsi bantuan dari pemerintah pusat adalah sebesar 80 % sementara sisanya berasal dari PAD, bagi hasil pajak dan bukan pajak dan lain-lain. Pada posisi ini Kabupaten Indragiri Hulu kurang mandiri dalam pembiayaan daerahnya. Hal ini dibuktikan dengan kemampuan daerah dan mobilitas daerah.
2. Dari hasil pengolahan data time series kurun waktu 1989-1998 dengan menggunakan variabel dependen derajat fiskal daerah

serta variabel independen X_1 (rasio total transfer pemerintah pusat terhadap penerimaan APBD), X_2 (laju PDRB berdasar harga konstan), X_3 (rasio tabungan Pemerintah Daerah dengan belanja pembangunan) diperoleh R^2 sebesar 0,808 yang artinya variable $X_1 X_2 X_3$ mampu menjelaskan variabel derajat fiskal daerah sebesar 80 % dan sebesar 19 % dipengaruhi oleh faktor-faktor diluar model. Pengujian variabel dependen secara serempak ditunjukkan F hitung sebesar 8.406 dan berada didaerah penolakan H_0 , artinya secara bersama-sama variabel X_1 (rasio total transfer pemerintah pusat terhadap penerimaan APBD), X_2 (laju PDRB berdasarkan harga konstan), X_3 (rasio tabungan pemerintah terhadap belanja pembangunan) berpengaruh terhadap derajat fiskal daerah.

3. Rasio Total Trasfer Pemerintah Pusat terhadap Penerimaan APBD(X_1) berpengaruh tidak signifikan terhadap derajat fiskaal daerah.
4. Laju PDRB harga konstan berpengaruh (X_2) sinifikan terhadap derajat fiskal daerah, dengan koefisien regresi positif, artinya laju pertumbuhan PDRB memberikan pengaruh terhadap derajat fiskal otonomi daerah.
5. Rasio Tabungan Pemerintah terhadap Belanja Tabungan (X_3) berpengaruh signifikan terhadap derajat fiskal daerah dengan koefisien regresi positif,artinya tabungan pemerintah daerah

menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai belanja pembangunan.

6. Uji asumsi klasik menunjukkan bahwa tidak terdapat pelanggaran terhadap multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi.

3.2 Sudono Susanto (2001)

Penelitian yang dilakukan oleh Sadono Susanto untuk penulisan skripsi di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia pada tahun 2001 dengan judul “Analisa Perimbangan Pembiayaan Fiskal Pusat dan Daerah di Kabupaten Banjarnegara”. Dalam praktek perkembangan antara otonomi daerah dengan pendapatan yang secara leluasa digali sendiri untuk mencukupi kebutuhan sendiri masih mempunyai beberapa kelemahan sehingga keterbatasan dalam potensi penerimaan daerah tersebut bisa menjadi ketergantungan terhadap alokasi pusat. Untuk melihat hal tersebut maka digunakan analisis sebagai berikut (Sudono susanto : 2001) :

(PDS/APBD)

Keterangan :

PDS : Pendapatan Daerah Sendiri (PAD + PBB)

APBD : Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (PAD + PBB + Bantuan)

Untuk mengetahui analisis terhadap derajat otonomi fiskal digunakan regresi sebagai berikut

$$DOF = a + b_1 TPE + b_2 B$$

Keterangan :

DOF : derajat otonomi fiskal diukur dengan besarnya proporsi PAD terhadap total penerimaan APBD tanpa subsidi

TPE : Tingkat Perkembangan Ekonomi Daerah, diukur dengan besarnya sumbangan sektor industri pengolahan, perdagangan, pengangkutan dan komunikasi terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

B : Sumbangan bantuan terhadap total penerimaan APBD

Dari hasil penelitian yang diperoleh adalah :

1. Desentralisasi fiskal Kabupaten Banjarnegara masih sangat rendah, hal ini dapat diketahui dengan masih cukup besarnya proporsi bantuan atau subsidi Pemerintah Pusat terhadap total penerimaan daerah hingga mencapai 77,82 %. Selain itu proporsi Penerimaan Asli Daerah juga masih rendah. Berdasarkan proporsi antara Bantuan Pemerintah dengan Total Penerimaan Daerah dan masih rendahnya PAD, maka dapat diketahui bahwa pembiayaan fiskal antara Pemerintah Pusat dan Daerah untuk Daerah Tingkat II Banjarnegara tidak seimbang.
2. Pemerintah Daerah Tingkat II Banjarnegara masih mempunyai ketergantungan fiskal yang cukup besar terhadap Pemerintah Pusat yang disebabkan oleh masih sulitnya untuk meningkatkan penerimaan daerah sendiri.

3. Faktor Tingkat Perkembangan Ekonomidan Bantuan atau Suibsi dari Pemerintah Pusat berpengaruh terhadap derajat otonomi fiskal yang berarti mempunyai pengaruh terhadap Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Kabupaten Banjarnegara.

BAB IV

LANDASAN TEORI

4.1 Perkembangan Sistem Desentralisasi Fiskal

Perbedaan konsep Otonomi Daerah masa lalu dan saat ini adalah berdasarkan kosepsinya pelaksanaan otonomi daerah pada masa lalu dipahami sebagai kewajiban. Artinya penyelenggaraan otonomi daerah lebih menitikberatkan peranan dan tanggung jawab pemerintah daerah kepada pemerintah pusat untuk menjalankan pembangunan pembangunan nasional. Sebagai konsekuensinya pemerintah daerah lebih mematuhi arahan dan instruksi pemerintah pusat daripada memperjuangkan aspirasi masyarakat daerah. Hal itu mudah dipahami karena pada waktu itu tujuan penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan koordinasi dan integrasi nasional untuk memantapkan stabilitas dan pembangunan nasional. Asas yang digunakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah pada masa lalu adalah asas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan. Pada prakteknya asas dekosentrasi adalah bentuk halus dari pelaksanaan sentralisasi. Hal itu diperkuat dengan ketergantungan pendanaan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat(Mardiasmo, 2002).

Desentralisasi fiskal dapat diartikan sebagai pelimpahan kewenangan di bidang penerimaan yang sebelumnya tersentralisasi baik secara administrasi dan pemanfaatannya diatur atau dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Dengan terjadinya

pelimpahan sebagian kewenangan terhadap sumber-sumber penerimaan negara kepada Pemerintah di Daerah.

Undang-undang Dasar 1945 merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan otonomi dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab, kepada daerah, dan sebagai Undang-undang pelaksana dari ketentuan Undang-undang Dasar 1945 tersebut adalah Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 sebagai pengganti Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di daerah. Pengertian desentralisasi menurut Undang-Undang No. 22 tahun 1999 ini adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 pasal 4 disebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi dibentuk dan disusun Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten, dan Daerah Kota (HAW. Widjaja, 106:2002). Daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan ekonomi, potensi daerah, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. Dengan adanya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 maka sudah tidak dipakai lagi tingkatan daerah otonomi, Daerah tingkat I dan Daerah tingkat II. Istilah tingkatan Daerah Otonomi (Dati I dan Dati II) dihapuskan untuk menghindari bahwa tingkatan lebih tinggi (Dati I) secara hirarki membawahi tingkatan yang lebih rendah (Dati II). Penghapusan istilah ini untuk menegaskan bahwa semua daerah otonomi (Propinsi maupun Kabupaten/Kota merupakan badan hukum yang terpisah dan

sejajar). Daerah Otonomi Propinsi tidak mempunyai hubungan komando dengan Daerah Otonomi Kabupaten dan Kota. Dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 juga dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah, sedangkan yang menjadi Badan Legislatif Daerah adalah DPRD. Meskipun sebagai Badan Legislatif Daerah dan berkedudukan sejajar dengan Pemerintah Daerah, tetapi DPRD bukan bagian dari Pemerintah Daerah.

Setiap daerah dipimpin oleh seorang Kepala Daerah sebagai Kepala Eksekutif yang dibantu oleh seorang Wakil Kepala Daerah. Kepala Propinsi disebut Gubernur, yang karena jabatannya juga merupakan wakil pemerintah. Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai Kepala Daerah, Gubernur bertanggungjawab kepada Presiden. Kepala Daerah Kabupaten disebut Bupati dan Kepala Daerah Kota disebut Wali Kota keduanya dalam menjalankan tugas dan kewenangan selaku kepala daerah, Bupati/Wali Kota bertanggungjawab kepada DPRD Kabupaten/Kota.

4.1.1 Pendapatan Daerah

Daerah sebagai badan hukum yang mempunyai otonomi dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri membutuhkan sumber-sumber pendapatan sebagai kekayaan untuk membiayai pembangunan daerah. Dalam usaha dalam menggali sumber-sumber pendapatan tersebut, dalam berupaya dengan berbagai cara, dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sumber pendapatan daerah tersebut, dapat dilihat pada Pasal 79 Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah, yaitu :

- a. Hasil Pajak Daerah,
 - b. Hasil Retribusi Daerah,
 - c. Hasil Perusahaan Milik Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
 - d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- 2. Dana Perimbangan;**
- 3. Pinjaman Daerah; dan**
- 4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.**

Pendapatan Asli Daerah adalah bagian sumber dari pendapatan daerah, dalam kaitannya dengan pelaksanaan Otonomi Daerah, peningkatan pendapatan asli daerah selalu diupayakan dan merupakan pencerminan dari keikutsertaan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) diatur dalam Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Bagian Laba Perusahaan Daerah (BUMD)

a. Pajak Daerah

Sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah merupakan sumber pendapatan yang terbesar dibandingkan dengan jenis pendapatan yang berasal dari Retribusi Daerah, Bagian Laba Perusahaan

Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah lainnya. Pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah yang berdasarkan peraturan daerah yang ditetapkan, dan dimaksudkan untuk pembiayaan kegiatan pemerintahan daerah.

b. Retribusi Daerah

Sumber Pendapatan Asli Daerah yang kedua adalah Retribusi Daerah yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan (Bahrul elmi,49:2002). Retribusi daerah merupakan pungutan langsung yang dikenakan untuk pelayanan tertentu dari Pemerintah Daerah.

c. Laba Perusahaan Daerah

Selain Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bagian Laba Perusahaan Milik Daerah (BUMD) merupakan salah satu sumber yang potensial untuk dikembangkan. Perusahaan Daerah seperti, Perusahaan Air Bersih (PDAM), Bank Pembangunan Daerah (BPD), hotel, bioskop, percetakan, perusahaan bis kota, dan pasar adalah jenis-jenis BUMD yang memiliki potensi sumber-sumber PAD, menciptakan lapangan kerja atau mendorong pembangunan ekonomi daerah.

2. Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

Jika dilihat dalam Undang-undang Pemerintahan Daerah Pasal 79 Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 disitu dijelaskan bukan pendapatan yang berasal dari pemerintah seperti yang terdapat di dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1974, tetapi dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 disebutkan dana

perimbangan, memang seharusnya istilah yang digunakan adalah dana perimbangan bukan bukan istilah pemberian pemerintah. Karena dana yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah tersebut merupakan bagian daerah setelah diambil oleh pusat dari daerah-daerah seperti yang tercantum di dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999, yaitu :

- ◆ Dana Perimbangan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 104 tahun 2000 dan Pasal 79 Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 sumber dana perimbangan yaitu :
 - a. Bagian Daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, dan Penerimaan dari Sumber Daya Alam
 - b. Dana Alokasi Umum; dan
 - c. Dana Alokasi Khusus.

Penerimaan Negara dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan imbalan 10% untuk Pemerintah Pusat dan 90% untuk Pemerintah Daerah. Penerimaan Negara dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) akan dibagi dengan imbalan 20% untuk Pemerintah Pusat dan 80% untuk daerah. Penerimaan Pemerintah Pusat dari bagi hasil PBB dan BPHTB tersebut akan dibagikan kepada seluruh daerah Kabupaten dan Kota.

Dana Alokasi Umum merupakan pengganti Dana Rutin Daerah dan Dana Pembangunan Daerah dalam pengertian bahwa bentuk

transfer dari pusat kepada daerah selain Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak selama ini adalah Dana Rutin Daerah dan Dana Pembangunan Daerah (Mardiasmo, 141:2002).

3. Dana Pinjaman

Di dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 ada terobosan baru tentang sumber pendapatan daerah, yaitu tentang pinjaman daerah, dimana Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman dari sumber dalam negeri maupun luar negeri dengan persetujuan DPRD. Ada beberapa tujuan Pemerintah Daerah melakukan pinjaman dana seperti:

- a. Untuk menutup defisit keuangan jangka pendek.
- b. Untuk membiayai kekurangan belanja rutin dan penghasilan retribusi dalam anggaran tahunan (annual budget).
- c. Membiayai pembelian perlengkapan dan mesin-mesin.
- d. Membiayai pembentukan modal jangka panjang.

Dana pinjaman sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah belum dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah daerah, disebabkan antara lain:

Pertama, keterbatasan kemampuan keuangan dalam APBD, kemudian adanya persyaratan yang relatif ketat yang diterapkan oleh Pemerintah Pusat dalam pemberian pinjaman.

Kedua, masih lemahnya kinerja sebagian besar BUMD dalam menjalankan usahanya, sehingga sering merugi dan menunggak mengembalikan pinjaman. Hal

ini umumnya terjadi sebagai akibat inefisiensi, karena masih lemahnya manajemen, SDM dan rendahnya moral sebagian pengelola BUMD.

Ketiga, sumber dana dari penerbitan obligasi daerah belum dapat dimanfaatkan karena ketidakpercayaan masyarakat terhadap perusahaan dan pemerintah daerah .

Keempat, belum terbentuknya lembaga pasar yang mampu menyediakan dana secara murah dan mudah diperoleh oleh pemerintah daerah (Bachrul elmi,107;2002)

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Yang dimaksud lain-lain usaha daerah yang sah dibagi menjadi dua bagian yaitu :

- 1) Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari hasil penjualan asset Daerah dan Jasa Giro.
- 2) Pendapatan asli Daerah yang sah berasal dari hibah atau penerimaan dari Daerah Kabupaten/Kota lainnya dan penerimaan lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

4.2 Tujuan Pembiayaan Fiskal Pusat dan Daerah

Hal ini menyangkut pada pembagian tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu antara tingkat-tingkat pemerintah dan pembagian sumber penerimaan untuk menutup pengeluaran akibat kegiatan-kegiatan itu. Tujuan utama pembiayaan ini adalah mencapai perimbangan berbagai bagian/pembagian ini agar antara potensi dan sumber daya masing-masing dapat sesuai. Alokasi Pemerintah Pusat kepada daerah mengandung tujuan yang

berbeda-beda untuk mempengaruhi bentuk dan lingkupnya (Nick Devas, 1997:163):

1. Pembelanjaan, seluruhnya atau sebagian, biaya pelayanan atau program pembangunan, yang kepentingannya bersifat nasional, yaitu yang dipandang sejalan dengan keinginan, kebijaksanaan dan sasaran pada tingkat nasional
2. Mendorong upaya oleh pemerintah regional untuk program-program pembangunan dan pelayanan yang sejalan dengan kebijaksanaan nasional.
3. Merangsang pertumbuhan ekonomi regional; baik untuk membantu pertumbuhan maupun mengurangi ketimpangan antar wilayah
4. Mengendalikan pengeluaran regional untuk memastikan penyesuaian terhadap standar kebijaksanaan nasional.
5. Memantapkan standar pelayanan atau pembangunan yang adil atau lebih adil.
6. Mengembangkan wilayah-wilayah yang kapasitas fiskalnya rendah, suatu potensi yang relatif untuk meningkatkan penerimaan langsung mereka.
7. Membantu wilayah-wilayah untuk mengatasi keadaan darurat.

4.3 Kebijakan Keuangan Negara

Keuangan Negara adalah keseluruhan tatanan, perangkat, kelembagaan kebijakan penganggaran negara yang meliputi pendapatan dan belanja Negara, sehingga kebijakan Negara secara garis besarnya tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Secara teoritis Anggaran Pendapatan Belanja seimbang tidak umum dikenal, karena keseimbangan dalam anggaran terdapat adanya aliran dana disisi penerimaan yang berasal dari luar negeri. Fungsi pinjaman luar negeri ini hanya untuk membiayai anggaran belanja pembangunan dan anggaran belanja dinamis, diartikan sebagai absolute sebagai peningkatan jumlah tabungan pemerintah (surplus dalam belanja rutin), sehingga kemampuan untuk menyediakan dana untuk belanja pembangunan dapat ditingkatkan.

Sumber-sumber pendapatan Negara dapat dibedakan atas penerimaan dalam negeri dan penerimaan pembangunan yang merupakan pinjaman dan bantuan luar negeri. Penerimaan dalam negeri terdiri atas penerimaan minyak bumi dan gas alam dan penerimaan diluar migas, yang terutama bersumber dari penerimaan pajak. Anggaran belanja Negara terdiri atas pengeluaran rutin, selisih antara penerimaan dalam negeri dan pengeluaran rutin merupakan tabungan pemerintah dan penerimaan pembangunan dana pembangunan pemerintah.

4.4 Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan daerah adalah seluruh tatanan, perangkat, kelembagaan dan kebijaksanaan anggaran daerah yang meliputi pendapatan dan belanja daerah (APBD). Sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab, berbagai kebijaksanaan keuangan daerah yang ditempuh diarahkan agar pemerintah daerah dapat semakin meningkatkan kemampuannya dalam membiayai urusan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerahnya. Peningkatan kemampuan daerah untuk membiayai urusan rumah tangganya sendiri di prioritaskan pada peningkatan sumber-sumber pendapatan asli daerah.

4.4.1 Penerimaan Daerah

4.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pembiayaan keuangan daerah berdasarkan UU No. 5 Tahun 1974 didukung oleh Pendapatan Asli Daerah yang merupakan sebagian kecil dari total APBD, dan Sumbangan serta Bantuan Pemerintah Pusat yang merupakan sebagian besar dari APBD. Sumber-sumber pendapatan asli daerah dibedakan atas penerimaan dari dalam yang meliputi pendapatan asli daerah dari sisa perhitungan anggaran tahun lalu, bagi hasil pajak/bukan pajak, sumbangan dan bantuan serta penerimaan pembangunan yang terdiri atas pinjaman pemerintah daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Namun setelah berlakunya Undang-Undang Otonomi Daerah Tahun 1999 maka pemerintah daerah memiliki wewenang untuk melaksanakan kegiatannya dan menjalankan pembangunan serta kewenangan yang lebih luas dalam mendapatkan sumber-sumber pembiayaan, baik yang berasal dari daerah itu sendiri maupun dana yang berasal dari APBN. Pendapatan asli daerah menurut UU No 34 Tahun 2000 adalah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan milik daerah dan pendapatan lain-lain yang sah.

4.4.1.2 Dana Perimbangan

Sebelum pelaksanaan otonomi daerah pada tahun 2001, sumber dana pemerintah daerah dalam melaksanakan rencana APBD adalah komponen dari bantuan dan subsidi pusat kepada pemerintah daerah tingkat II adalah subsidi daerah otonom, yang menunjang

karena itu belanja pegawai menunjukkan jumlah terbesar diantara semua jenis pengeluaran rutin lainnya.

4.4.2.2 Pengeluaran Pembangunan Daerah

Sektor yang mendapat prioritas utama pengeluaran ini adalah sektor perhubungan dan pariwisata dalam rangka lebih memperlancar arus manusia, barang, jasa, dan informasi serta mendorong pemerataan hasil pembangunan sedangkan peningkatan pada sektor pertanian dan pengairan ditujukan terutama untuk kegiatan intensifikasi, ekstensifikasi dalam rangka mempertahankan swasembada pangan meningkatkan pendapatan petani dan menumbuhkan kesempatan kerja.

4.5 Desentralisasi Fiskal

Pada dasarnya UU No. 22 Tahun 1999 juga masih menggunakan asas-asas pemerintahan dalam UU No. 5 tahun 1974. asas-asas tersebut adalah desentralisasi, dekosentrasi, dan tugas pembantuan. perbedaannya adalah sebagai berikut :

- pemberian asas desentralisasi penuh diberikan kepada pemerintah kabupaten dan kota dalam wujud otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab
- pelaksanaan asas dekosentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.

- Pelaksanaan tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan desa dari pemerintah daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu disertai pembiayaan.

Asas desentralisasi penuh kepada daerah kabupaten dan kota brimplikasi pada penyelenggaraan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab. Otonomi daerah secara luas berarti

4.6 Derajat Otonomi Fiskal Daerah

Derajat otonomi fiskal daerah merupakan indikator yang menunjukkan kepada kemampuan daerah dalam usaha meningkatkan pendapatan asli daerah. Derajat otonomi fiskal daerah ini diukur dengan menggunakan rasio antara pendapatan asli daerah dengan total penerimaan daerah tanpa subsidi dari pemerintah pusat. Semakin besar derajat otonomi fiskal daerah semakin besar kemampuan daerah untuk melakukan otonomi.

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 D$$

Koefisien regresi ($\beta_0, \beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$) menunjukkan taksiran pengaruh perubahan nilai parameter masing-masing variable. Apabila koefisien regresi lebih besar dari nol ($\beta > 0$), maka variable tersebut mampu memberi pengaruh terhadap derajat otonomi fiskal daerah. Sebaliknya apabila ($\beta < 0$), maka variable tersebut justru mengurangi pengaruh derajat otonomi fiskal daerah.

4.7 Tingkat Perkembangan Ekonomi

Peninjauan keadaan perekonomian suatu daerah secara makro dapat dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Meskipun PDRB bukanlah satu-satunya cara antik mengukur kesejahteraan, namun PDRB dapat menggambarkan

produk yang dihasilkan oleh unit-unit ekonomi suatu daerah, sehingga dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengetahui perkembangan ekonomi secara keseluruhan. PDRB adalah untuk mengetahui tingkat produk yang dihasilkan oleh seluruh faktor produksi, besarnya laju pertumbuhan ekonomi dan struktur perekonomian pada satu periode di suatu daerah tertentu. Laju pertumbuhan ekonomi dapat diketahui jika data PDRB dikaji dari sudut perbandingan besaran (nilai) atas dasar harga yang konstan, sedangkan struktur ekonomi dapat dilihat dari besarnya sumbangan masing-masing sektor ekonomi terhadap total PDRB. Perhitungan PDRB dibedakan menjadi dua yaitu :

1. PDRB atas harga konstan

Seluruh angka-angka pendapatan nasional dinilai atas dasar harga tetap yang terjadi pada tahun 1993. karena penggunaan harga tetap maka, maka perkembangan riil bukan karena perkembangan yang dipengaruhi oleh kenaikan harga.

2. PDRB atas dasar harga berlaku

Seluruh angka-angka pada pendapatan regional dinilai atas dasar harga berlaku pada masing-masing tahunnya baik pada saat menilai produksi maupun biaya antara pada penilaian komponen PDRB.

Dengan demikian PDRB dapat dijadikan sebagai salah satu tolak ukur dalam melihat perkembangan ekonomi suatu daerah. Semakin besar nilai PDRB dan perkembangannya, maka akan semakin maju perekonomian Negara tersebut, atau dengan kata lain daerah tersebut telah berhasil dalam melaksanakan pembangunannya.

BAB V

ANALISIS DATA

5.1 Derajat Desentralisasi Fiskal

Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Pekanbaru berdasarkan hasil perhitungan dapat dilihat pada lampiran. Berdasarkan perbandingan proporsi antara PAD, PPD dan Bantuan terhadap TPD dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Desentralisasi fiskal Kota Pekanbaru masih sangat rendah, hal ini dapat terlihat dengan masih rendahnya proporsi PAD terhadap TPD dan PPD terhadap TPD. Proporsi PAD terhadap TPD pada tahun anggaran 1993/1994 adalah sebesar 13,42% dan terus meningkat hingga pada tahun anggaran 2000 yaitu menjadi sebesar 26,97%. Namun setelah otonomi daerah diterapkan pada tahun 2001 proporsi PAD terhadap TPD menjadi 11,06%, tetapi penerimaan daerah yang berasal dari pajak daerah sangat besar mencapai 46%. (lampiran 6)
2. Proporsi PPD terhadap TPD juga masih sangat rendah, angka terendah pada tahun anggaran 1993/1994 sebesar 8,36% dan terus mengalami peningkatan hingga ke titik 25,92% pada tahun anggaran 2000, dan pada tahun 2001 dan 2002 pendapatan daerah yang berasal dari pajak daerah mencapai 46%. (lampiran 6)
3. Proporsi bantuan daerah untuk Kota Pekanbaru cukup tinggi namun tiap tahun tidak mengalami kenaikan dalam jumlah, bahkan menurun secara fluktuatif. Pada tahun anggaran 1993/1994 jumlah proporsi bantuan sebesar 78,21% pada tahun anggaran 1994/1995 sebesar 70,89%, dan

pada tahun 2001 dan 2002 proporsi bantuan pemerintah pusat terhadap pemerintah Kota Pekanbaru berada di bawah 50% yaitu sebesar 42%.(lihat lampiran)

5.2 Analisa Ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat

Berdasarkan perhitungan dengan membandingkan PDS dengan APBD(TPD) dapat diketahui bahwa Kota Pekanbaru masih mengalami ketergantungan yang cukup besar terhadap Pemerintah Pusat. Ini terlihat dari masih rendahnya proporsi PDS terhadap APBD atau berada di bawah 50%. Proporsi terendah pada tahun anggaran 1993/1994 yaitu sebesar 21,78% dan terus mengalami peningkatan hingga mencapai 48,78% pada tahun anggaran 1999/2000. Pada tahun anggaran 2000,2001 dan 2002 proporsi PDS terhadap APBD berada di atas 50% yaitu pada tahun 2000 sebesar 52,90%, pada tahun 2001 dan 2002 sebesar 57%. Dengan adanya otonomi daerah maka Pemerintah Daerah diberi wewenang luas dalam meningkatkan pendapatan daerahnya sendiri.

5.3 Deskripsi Data

Analisis deskripsi merupakan suatu metode analisis data dengan pendeskripsian faktor-faktor yang berhubungan dengan permasalahan yang dimaksud, sebagai pendukung analisis kuantitatif. Otonomi fiskal daerah menunjuk kepada kemampuan daerah dalam meningkatkan PAD. Salah satu yang digunakan untuk mengukur derajat otonomi fiskal ini adalah dengan *administrative independency ratio* yaitu rasio antara PAD dengan APBD tanpa adanya subsidi. Transfer pemerintah terbesar justru digunakan untuk

pembangunan. *administrative independency ratio* akan digunakan sebagai variable dependen.

Penelitian ini berkaitan dengan kemampuan Kota Pekanbaru dalam kemandirian pembiayaan yang dipengaruhi oleh variable X_1 (tingkat perkembangan ekonomi dalam persen), X_2 (rasio total transfer pemerintah pusat terhadap penerimaan APBD), X_3 (rasio tabungan pemerintah terhadap belanja pembangunan), dummy (variable sebelum dan sesudah otonomi daerah) dalam kurun waktu 1993-2002.

Rasio total bantuan terhadap penerimaan akan menunjukkan seberapa besar bantuan pemerintah yang boleh dimanfaatkan oleh daerah sesuai dengan keinginan pemerintah tersebut. Secara umum hubungan antara bantuan dengan derajat fiskal daerah adalah negatif.

Tingkat perkembangan ekonomi atau laju pertumbuhan PDRB akan menunjukkan seberapa besar perkembangan ekonomi suatu daerah yang ditunjukkan dengan semakin tingginya laju pertumbuhan PDRB akan memberikan pengaruh positif terhadap derajat otonomi fiskal daerah.

Rasio tabungan pemerintah terhadap belanja pembangunan akan menunjukkan seberapa besar kemampuan suatu daerah dalam membiayai belanja pembangunan di daerah tersebut dengan menggunakan tabungan sendiri. Secara teori maka akan terdapat hubungan positif antara rasio tabungan pemerintah daerah dengan derajat otonomi fiskal.

Dengan data yang diperoleh sebagai berikut

Tabel 5.1
Data penelitian kurun waktu 1993-2002

Tahun	Y	X ₁	X ₂	X ₃	D
1993	0,615975942	0,032717795	0,782107049	0,883119414	0,00
1994	0,568789385	0,080411579	0,708982748	1,0782695	0,00
1995	0,550780027	0,111288297	0,674525146	1,112686628	0,00
1996	0,528866553	0,095555805	0,610333677	1,392471897	0,00
1997	0,549282838	0,133226234	0,570814681	1,235304802	0,00
1998	0,538783642	-0,02479957	0,603479778	0,965604664	0,00
1999	0,529817069	-0,016526715	0,512146589	1,739376537	0,00
2000	0,509886929	0,165099998	0,470998283	2,123067911	0,00
2001	0,192537067	0,033889619	0,425401318	1,194604212	1,00
2002	0,195469587	0,079700004	0,427998755	1,783135079	1,00

Sumber : Biro Pusat Statistik

Keterangan :

Y = Rasio antara PAD dengan APBD tanpa adanya subsidi dari pemerintah pusat (%)

X₁ = Tingkat perkembangan ekonomi yaitu laju pertumbuhan PDRB (%)

X₂ = Rasio total transfer pemerintah pusat terhadap penerimaan APBD (%)

X₃ = Rasio tabungan pemerintah terhadap belanja pembangunan (%)

D = Variabel *dummy*

D = 0, sebelum otonomi daerah

D = 1, sesudah otonomi daerah

5.4 Analisis Hasil Regresi

Langkah pertama dalam pengolahan data adalah melakukan pengujian regresi, dengan bantuan komputer yaitu menggunakan program Eviews 3.0. Melalui pengujian tersebut akan didapat persamaan garis regresi yang tercipta dari rangkaian data penelitian, sekaligus menggambarkan tingkat pengaruh data-data yang termasuk dalam variabel bebas terhadap data variabel bebas. Hasil pengujian dari penelitian ini dengan menggunakan program Eviews 3.0 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.2

5.4.1 Hasil Regresi

Dependent Variable: Y
 Method: Least Squares
 Date: 05/16/04 Time: 19:58
 Sample: 1993 2002
 Included observations: 10

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.345705	0.086595	3.992231	0.0104
X1	-0.057992	0.095088	-0.609873	0.5686
X2	0.317121	0.098683	3.213522	0.0236
X3	0.008596	0.024087	0.356885	0.7357
DUMMY	-0.296526	0.019766	-15.00193	0.0000
R-squared	0.994124	Mean dependent var		0.477518
Adjusted R-squared	0.989423	S.D. dependent var		0.152265
S.E. of regression	0.015659	Akaike info criterion		-5.168626
Sum squared resid	0.001226	Schwarz criterion		-5.017333
Log likelihood	30.84313	F-statistic		211.4794
Durbin-Watson stat	2.358863	Prob(F-statistic)		0.000009

Dari hasil pengujian diatas, maka dapat dihasilkan persamaan garis regresinya :

$$Y = 0,345705 - 0,057992 X1 + 0,317121 X2 + 0,008596 X3 - 0,296526 D$$

Dimana :

Y = Rasio antara PAD dengan APBD tanpa adanya subsidi dari pemerintah pusat (%) (derajat otonomi fiskal)

X_1 = Tingkat perkembangan ekonomi yaitu laju pertumbuhan PDRB(%)

X_2 = Rasio total transfer pemerintah pusat terhadap penerimaan APBD(%)

X_3 = Rasio tabungan pemerintah terhadap belanja pembangunan (%)

D = Variabel *dummy*

$D = 0$, sebelum otonomi daerah

$D = 1$, sesudah otonomi daerah

5.4.2 Pengujian Statistik

5.4.2.1 Pengujian Variabel Penjelas Secara Individu

Untuk melihat apakah variabel-variabel penjelas mempunyai hubungan yang berarti (signifikan) dengan variabel terikat dapat melalui :

1. Tanda parameter regresi dibandingkan dengan teori. Apabila tanda parameter regresi tidak sesuai dengan teori maka dapat dikatakan hasil regresi mendukung teori.
2. kesalahan standar hasil regresi masing-masing variabel. Jika kesalahan standar semakin kecil maka hasil regresi semakin dekat dengan yang sebenarnya.
3. pengujian tersebut jika semakin tinggi t-hitung pada derajat kepercayaan tertentu maka hubungan variabel penjelas dengan

variabel yang dijelaskan mempunyai hubungan yang berarti atau signifikan secara statistik.

Berdasarkan hasil regresi di atas didapat t hitung sebagai berikut :

$$Y = 0,345705 - 0,057992 X_1 + 0,317121 X_2 + 0,008596 X_3 - 0,296526D$$

$$T \text{ hit} = \quad \quad (-0,609873) \quad (3,213522) \quad (0,356885)$$

Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan uji t statistik satu sisi terhadap masing-masing variabel bebas, dari hasil pengujian regresi didapat nilai t hitung dari masing-masing variabel bebas untuk selanjutnya dibandingkan dengan nilai t-tabel. Cara yang dilakukan untuk menentukan nilai t tabel adalah

$$T \text{ table} = \alpha \text{ df } (n-k)$$

Dimana :

α adalah tingkat signifikansi

df adalah derajat bebas

n adalah jumlah data

k adalah jumlah variabel independent yang digunakan termasuk

konstanta kemudian dicari pada t tabel.

Dengan demikian maka dapat ditentukan nilai t tabel yang dipakai dalam penelitian ini, dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05 dan derajat bebas (10-4) sebesar 6 maka nilai t tabel didapat 1,943

Apabila nilai t hitung > t tabel ; maka variable bebas berpengaruh secara signifikan terhadap variable terikat, dan sebaliknya jika t hitung < t

tabel ; berarti variable bebas tidak signifikan mempengaruhi variable terikat.

Dari hasil pengujian regresi didapat t hitung seperti tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 5.3
Nilai *t* hitung Tiap Variabel Bebas

Variable	t-hitung	t-tabel	keterangan
X ₁	- 0,609873	1,943	Tidak signifikan
X ₂	3,213522	1,943	Signifikan
X ₃	0,356885	1,943	Tidak signifikan
dummy	-15,00193	-1,943	signifikan

5.4.2.2 Pengujian Variabel Secara Serempak

Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan uji *F*, yaitu untuk mengetahui apakah ada perbedaan mean yang timbul. Dimana perbedaan tersebut hanya secara kebetulan atau karena faktor-faktor lain yang benar-benar berarti atau signifikan. Untuk mencari *F* tabel :

$$\begin{aligned}
 F \text{ tabel} &= F (k-1, n-k) \\
 &= F (\alpha = 5\%, k-1, n-k) \\
 &= F (0,05, 3, 6) \\
 &= 4,76
 \end{aligned}$$

Dengan demikian hipotesis pengujian :

$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = D = 0$; berarti secara bersama-sama atau serempak variable-variabel X_1 (laju PDRB), X_2 (rasio total transfer pemerintah terhadap APBD), X_3 (Rasio tabungan pemerintah terhadap belanja pembangunan) tidak mempengaruhi derajat fiskal daerah.

$H_a : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq D \neq 0$; berarti secara bersama-sama atau serempak variable-variabel X_1 (laju PDRB), X_2 (rasio total transfer pemerintah terhadap APBD), X_3 (Rasio tabungan pemerintah terhadap belanja pembangunan) mempengaruhi derajat fiskal daerah.

Jika F hitung $> F$ tabel, maka H_0 ditolak dan H_a diterima

Jika F hitung $< F$ tabel, maka H_0 diterima dan H_a ditolak

Karena F hitung $> F$ tabel yaitu $221,4794 > 4,76$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, berarti X_1 (laju PDRB), X_2 (rasio total transfer pemerintah terhadap APBD), X_3 (Rasio tabungan pemerintah terhadap belanja pembangunan) secara serempak mempengaruhi derajat fiskal daerah.

5.4.2.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Untuk mengukur ketepatan suatu garis regresi terhadap hasil observasi di gunakan analisis koefisien determinasi (R^2). Koefisien determinasi (R^2) menunjukkan besarnya kontribusi (sumbangan) dari variable X_1 X_2 X_3 dan D secara bersama – sama dapat menjelaskan variable Y . Berdasarkan perhitungan dihasilkan R^2 sebesar 0,994142 yang berarti 99% variabel derajat fiskal daerah mampu dijelaskan oleh variable-variabel X_1 (laju perkembangan PDRB), X_2 (rasio total transfer pemerintah terhadap APBD), X_3 (Rasio tabungan pemerintah terhadap belanja pembangunan).

5.5 Pengujian Asumsi Klasik

5.5.1 Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah situasi dimana terdapat korelasi variable-variabel bebas diantara satu dengan yang lainnya, dalam hal ini dapat disebut variable-variabel tersebut tidak *orthogonal*. Variable bersifat *orthogonal* adalah variable bebas yang nilai koefisien antar sesame sama dengan nol .

Langkah pengujian tersebut ditempuh dengan melihat korelasi antar variable bebas sehingga diketahui r^2 untuk setiap variable bebas, untuk selanjutnya dibandingkan dengan nilai R^2 pada pengujian persamaan regresi. Jika nilai r^2 lebih kecil dari R^2 nilai maka dalam model regresi tidak terdapat multikolinearitas, seperti tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 5.4
Hasil pengujian multikolinearitas

variabel	r^2	R^2	keterangan
X1 – X2 X3	-0,170318	0,994142	Tidak ada multikolinearitas.
X2 – X1 X3	0,712653	0,994142	Tidak ada multikolinearitas
X3 – X1 X2	0,569272	0,994142	Tidak ada multikolinearitas
D – 0X1 X2 X3	0,411569	0,994142	Tidak ada multikolinearitas

Dari hasil uji multikolinearitas dapat diketahui bahwa nilai $r^2 < R^2$ maka dalam persamaan tersebut tidak terjadi multikolinearitas.

5.5.2 Uji autokorelasi

Autokorelasi adalah korelasi (hubungan) yang terjadi diantara anggota-anggota dari serangkaian pengamatan yang tersusun dalam rangkaian waktu seperti pada data runtun waktu atau time series. Salah satu asumsi dalam regresi linear klasik adalah tidak terjadinya autokorelasi dalam kesalahan pengganggu. Pengujian yang dilakukan untuk medeteksi ada tidaknya autokorelasi adalah dengan menggunakan pengujian Durbin-Watson, yaitu dengan menempatkan d statistic kedalam daerah pengujian autokorelasi yang disusun setelah mengetahui nilai dL serta dU yang didapat dari tabel Durbin-Watson dengan keterangan sebagai berikut:

n adalah jumlah data

k' adalah jumlah variable bebas

dL adalah batas bawah

dU adalah batas atas

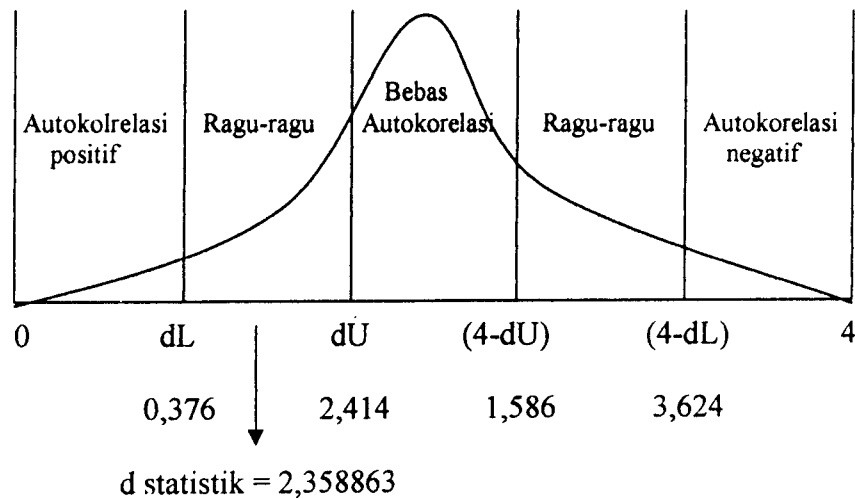
Dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05 serta $n=10$ dan

$k' = 4$ maka didapat :

$$dL = 0,376 \quad 4-dL = 3,624 \quad \text{nilai } d \text{ statistik} = 2,358863$$

$$dU = 2,414 \quad 4-dU = 1,586$$

Gambar 5.1



- ❖ jika d lebih kecil daripada dL atau lebih besar dari $(4-dL)$; maka hipotesis nol ditolak, dengan pilihan pada alternatif yang berarti terdapat autokorelasi
- ❖ jika d terletak antara dU dan $(4-dU)$; maka hipotesis nol diterima, yang berarti tidak ada autokorelasi.
- ❖ Jika d terletak antara dL dan dU atau diantara $(4-dU)$ dan $(4-dL)$; maka uji

Durbin-Watson tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti (*inconclusive*), untuk nilai-nilai ini tidak dapat disimpulkan ada tidaknya autokorelasi antara faktor-faktor gangguan.

Dari hasil estimasi model regresi diperoleh d statistik sebesar 2,358863 yang berarti terletak pada daerah bebas autokorelasi, dengan kata lain didalam data penelitian yang diestimasi ini tidak terdapat autokorelasi atau bebas autokorelasi.

5.5.3 Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah dimana seluruh faktor gangguan tidak memiliki varian yang sama atau variannya tidak konstan, asumsi tersebut menyatakan bahwa varian setiap U_i disekitar rerata nolnya tidak tergantung pada nilai variabel bebas.

Salah satu pengujian untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model regresi dilakukan dengan melakukan *uji park*, yaitu dengan melakukan regresi dengan e^2_i sebagai *proxy* dari factor pengganggu yang digunakan selaku variable terikatnya. Jika β ternyata secara statistik signifikan, maka hal ini menunjukkan kehadiran situasi heteroskedastisitas dalam data yang digunakan. Sebaliknya jika ternyata β secara statistik tidak signifikan maka dapat disimpulkan bahwa *disturbance term* bersifat homoskedastisitas.

Hasil uji park untuk model persamaan regresi yang diteliti adalah

Tabel 5.5

Hasil Heterokedastisitas dengan Uji PARK

Dependent Variable: LRES12

Method: Least Squares

Date: 05/16/04 Time: 20:00

Sample: 1993 2002

Included observations: 10

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-5.282008	18.65184	-0.283190	0.7884
X1	-9.949489	20.48126	-0.485785	0.6477
X2	-2.061740	21.25564	-0.096997	0.9265
X3	0.337701	5.188256	0.065089	0.9506
DUMMY	1.049985	4.257422	0.246625	0.8150
R-squared	0.118218	Mean dependent var		-6.496014
Adjusted R-squared	-0.587208	S.D. dependent var		2.677269
S.E. of regression	3.372942	Akaike info criterion		5.576300
Sum squared resid	56.88368	Schwarz criterion		5.727593
Log likelihood	-22.88150	F-statistic		0.167584
Durbin-Watson stat	2.269772	Prob(F-statistic)		0.945923

Dengan melihat koefisien parameter β , maka tidak ada yang signifikan. Dengan kata lain tidak terdapat heteroskedastisitas didalam model persamaan regresi yang diamati

5.6 Pembahasan Hipotesa

1. Desentralisasi fiskal Kota Pekanbaru masih sangat rendah, hal ini dapat diketahui dengan masih besarnya proporsi bantuan atau subsidi dari Pemerintah Pusat terhadap APBD hingga mencapai 78,21% pada tahun 1993/1994 dan terus mengalami penurunan hingga pada tahun anggaran 2001 dan 2002 berada di bawah 50%. Hal ini berarti bahwa setelah otonomi daerah direalisasikan bantuan Pemerintah Pusat atau sekarang dengan nama Dana Perimbangan tidak terlalu besar untuk Pemerintah Daerah.

2. Koefisien determinasi berganda (R^2) sebesar sebesar 0,994142 artinya 99 % variasi variabel X_1 (tingkat perkembangan ekonomi dalam persen), X_2 (rasio total transfer pemerintah pusat terhadap penerimaan APBD), X_3 (rasio tabungan pemerintah terhadap belanja pembangunan), dummy (variable sebelum dan sesudah otonomi daerah) mampu menjelaskan variasi variabel derajat otonomi fiskal, sedangkan sisanya 1 % dijelaskan oleh variabel diluar variable X_1 (tingkat perkembangan ekonomi dalam persen), X_2 (rasio total transfer pemerintah pusat terhadap penerimaan APBD), X_3 (rasio tabungan pemerintah terhadap belanja pembangunan) dan dummy (variable sebelum dan sesudah otonomi daerah)
3. Secara parsial hanya dipengaruhi oleh X_2 yaitu rasio total transfer pemerintah pusat terhadap penerimaan APBD cukup besar, ditunjukkan oleh koefisien regresi yakni apabila terjadi kenaikan sebesar 1 persen maka derajat otonomi fiskal daerah mengalami kenaikan sebesar 0.317 (32%).
4. Laju perkembangan PDRB harga konstan X_1 tidak berpengaruh secara signifikan terhadap derajat otonomi fiskal daerah. Hal ini berarti bahwa derajat otonomi fiskal Kota Pekanbaru tidak dipengaruhi oleh adanya perkembangan PDRB, hal ini disebabkan komponen terbesar pembentuk PDRB dari sisi pengeluaran adalah konsumsi dan investasi.

5. *Dummy* berpengaruh signifikan terhadap derajat otonomi daerah. *Dummy* adalah pembeda untuk keadaan sebelum dan sesudah otonomi daerah diberlakukan. Setelah otonomi daerah diberlakukan, Pemerintah Kota Pekanbaru dapat mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah untuk pembiayaan Anggaran Belanja Pemerintah Kota Pekanbaru.

BAB VI

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

6.1 Kesimpulan

Dari hasil analisis yang telah dilakukan dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Derajat Desentralisasi fiskal Kota Pekanbaru dalam kurun waktu 1993-2002 memiliki kecendrungan yang semakin rendah, hal ini dapat diketahui dengan masih besarnya proporsi bantuan atau subsidi dari Pemerintah Pusat terhadap APBD hingga mencapai 78,21% pada tahun 1993/1994 dan terus mengalami penurunan hingga pada tahun anggaran 2001 dan 2002 berada di bawah 50%. Hal ini berarti dalam melaksanakan otonomi daerah Pemerintah daerah mempunyai keleluasaan dalam meningkatkan pendapatan daerahnya untuk membiayai belanja rutin dan belanja pembangunan daerahnya.
2. Tingkat ketergantungan fiskal Kota Pekanbaru dipengaruhi oleh bantuan dan subsidi dari pemerintah pusat. Hal ini dapat dilihat dengan semakin rendahnya tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat, yaitu jika hasil perhitungan berada di atas 50% maka ketergantungan terhadap pemerintah pusat rendah.
3. Dari hasil pengolahan data time series kurun waktu 1993-2002 derajat otonomi fiskal Kota Pekanbaru variabelnya secara bersama-sama dipengaruhi oleh variable dependen X_1 (tingkat perkembangan ekonomi

dalam persen), X_2 (rasio total transfer pemerintah pusat terhadap penerimaan APBD), X_3 (rasio tabungan pemerintah terhadap belanja pembangunan). Pengujian variabel secara serempak ditunjukkan F hitung $> F$ tabel yaitu $221,4794 > 4,76$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, berarti X_1 (laju PDRB), X_2 (rasio total transfer pemerintah terhadap APBD), X_3 (Rasio tabungan pemerintah terhadap belanja pembangunan) secara serempak mempengaruhi derajat fiskal daerah.

4. Secara parsial variabel yang berpengaruh terhadap derajat otonomi fiskal adalah variabel Rasio total transfer daerah terhadap penerimaan APBD berpengaruh signifikan. Ini berarti tingkat ketergantungan Fiskal Kota Pekanbaru terhadap Subsidi dan transfer Pemerintah Pusat sangat tinggi. Variabel berupa pelaksanaan otonomi daerah Dummy berpengaruh signifikan terhadap derajat otonomi daerah, dapat dilihat bahwa ketergantungan pemerintah kota Pekanbaru terhadap pusat sangat tinggi pada saat sebelum di berlakukannya otonomi daerah penuh, namun setelah diberlakukannya otonomi daerah Pemerintah Kota Pekanbaru dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya sehingga tingkat ketergantungan berkurang. Hal ini dimungkinkan karena pelimpahan kewenangan dalam mengurus rumah tangga daerahnya.
5. Uji asumsi klasik menunjukkan bahwa tidak terdapat pelanggaran terhadap multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi.

6.2 Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian, maka terdapat beberapa hal yang perlu dicermati oleh pemerintah daerah yaitu :

1. Upaya untuk menurunkan Derajat desentralisasi Fiskal melalui peningkatan PAD dan Pajak Penerimaan Daerah dapat dipertahankan.
2. Upaya untuk menurunkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat melalui peningkatan pendapatan daerah sendiri dapat dipertahankan.
3. Dengan diberlakukannya otonomi daerah maka usaha-usaha yang dapat mendorong kemandirian dapat dipertahankan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani,Ria ,2001, *Analisis Kemampuan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Propinsi Riau dalam Kemandirian Pembiayaan Daerah Menyongsong Implementasi UU No. 25 Tahun 1999*, Skripsi UII, tidak dipublikasikan, Yogyakarta.
- Bhinadi, Ardhito, Hubungan Fiskal antara Pusat dan Daerah Studi Kasus Proyek Percontohan Otonomi Daerah di Daerah Tingkat II Kabupaten Sleman, Buletin Ekonomi No. 4 Tahun Pertama Desember 1997.
- Badan Pusat Statistik, PDRB Kota Pekanbaru, beberapa tahun terbit
_____, Pekanbaru dalam angka, 2002
- Devas, Nick, 1989, *Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia*, UI Press, Jakarta.
_____, 2002, *Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia*, UI Press, Jakarta
- Elmi, Bahrul, 2002, *Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia*, UI Press, Jakarta.
- Gujarati, Damodar, 1991, *Ekonometri dasar*,(Terjemahan), Erlangga, Jakarta.
- Mardiasmo,2002, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi, Yogyakarta.
- Singarimbun,Masri,1989, *Metode Penelitian Survei*, LP3 ES, Jakarta
- Susanto, Sudono, 2001, *Analisa Perimbangan Pembiayaan Fiskal Pusat dan Daerah di Kabupaten Banjarnegara*, skripsi sarjana UII, tidak dipublikasikan, Yogyakarta
- Widjaja, HAW, 2002, *Otonomi Daerah Dan daerah Otonom*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

LAMPIRAN

Lampiran 1

Hasil Regresi

Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 05/16/04 Time: 19:58
Sample: 1993 2002
Included observations: 10

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.345705	0.086595	3.992231	0.0104
X1	-0.057992	0.095088	-0.609873	0.5686
X2	0.317121	0.098683	3.213522	0.0236
X3	0.008596	0.024087	0.356885	0.7357
DUMMY	-0.296526	0.019766	-15.00193	0.0000
R-squared	0.994124	Mean dependent var		0.477518
Adjusted R-squared	0.989423	S.D. dependent var		0.152265
S.E. of regression	0.015659	Akaike info criterion		-5.168626
Sum squared resid	0.001226	Schwarz criterion		-5.017333
Log likelihood	30.84313	F-statistic		211.4794
Durbin-Watson stat	2.358863	Prob(F-statistic)		0.000009

Hasil Heterokedastisitas dengan Uji PARK

Dependent Variable: LRES12
Method: Least Squares
Date: 05/16/04 Time: 20:00
Sample: 1993 2002
Included observations: 10

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-5.282008	18.65184	-0.283190	0.7884
X1	-9.949489	20.48126	-0.485785	0.6477
X2	-2.061740	21.25564	-0.096997	0.9265
X3	0.337701	5.188256	0.065089	0.9506
DUMMY	1.049985	4.257422	0.246625	0.8150
R-squared	0.118218	Mean dependent var		-6.496014
Adjusted R-squared	-0.587208	S.D. dependent var		2.677269
S.E. of regression	3.372942	Akaike info criterion		5.576300
Sum squared resid	56.88368	Schwarz criterion		5.727593
Log likelihood	-22.88150	F-statistic		0.167584
Durbin-Watson stat	2.269772	Prob(F-statistic)		0.945923

Lampiran 2

Hasil – hasil Pengujian Multikolinearitas

Dependent Variable: X1
 Method: Least Squares
 Date: 05/16/04 Time: 20:11
 Sample: 1993 2002
 Included observations: 10

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.226353	0.360116	-0.628555	0.5528
X2	0.252774	0.410924	0.615136	0.5611
X3	0.108335	0.093482	1.158892	0.2905
DUMMY	0.013990	0.084670	0.165226	0.8742
R-squared	0.219788	Mean dependent var		0.069056
Adjusted R-squared	-0.170318	S.D. dependent var		0.062148
S.E. of regression	0.067232	Akaike info criterion		-2.272158
Sum squared resid	0.027121	Schwarz criterion		-2.151124
Log likelihood	15.36079	F-statistic		0.563407
Durbin-Watson stat	1.991324	Prob(F-statistic)		0.658763

Dependent Variable: X2
 Method: Least Squares
 Date: 05/16/04 Time: 20:12
 Sample: 1993 2002
 Included observations: 10

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.857985	0.075131	11.41979	0.0000
X1	0.234692	0.381528	0.615136	0.5611
X3	-0.196194	0.059283	-3.309443	0.0162
DUMMY	-0.152507	0.053010	-2.876946	0.0282
R-squared	0.808435	Mean dependent var		0.578679
Adjusted R-squared	0.712653	S.D. dependent var		0.120852
S.E. of regression	0.064783	Akaike info criterion		-2.346382
Sum squared resid	0.025181	Schwarz criterion		-2.225348
Log likelihood	15.73191	F-statistic		8.440322
Durbin-Watson stat	1.068983	Prob(F-statistic)		0.014227

Dependent Variable: X3
 Method: Least Squares
 Date: 05/16/04 Time: 20:12
 Sample: 1993 2002
 Included observations: 10

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.225184	0.648369	4.974303	0.0025
X1	1.688265	1.456792	1.158892	0.2905
X2	-3.293002	0.995032	-3.309443	0.0162
DUMMY	-0.427072	0.286058	-1.492958	0.1861
R-squared	0.712848	Mean dependent var		1.350764
Adjusted R-squared	0.569272	S.D. dependent var		0.404399
S.E. of regression	0.265407	Akaike info criterion		0.474067
Sum squared resid	0.422644	Schwarz criterion		0.595101
Log likelihood	1.629664	F-statistic		4.964948
Durbin-Watson stat	2.000289	Prob(F-statistic)		0.045851

Lampiran 3

Dependent Variable: DUMMY
Method: Least Squares
Date: 05/16/04 Time: 20:13
Sample: 1993 2002
Included observations: 10

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.234134	1.206488	2.680618	0.0365
X1	0.323763	1.959515	0.165226	0.8742
X2	-3.801399	1.321331	-2.876946	0.0282
X3	-0.634236	0.424818	-1.492958	0.1861
R-squared	0.607713	Mean dependent var		0.200000
Adjusted R-squared	0.411569	S.D. dependent var		0.421637
S.E. of regression	0.323435	Akaike info criterion		0.869535
Sum squared resid	0.627660	Schwarz criterion		0.990569
Log likelihood	-0.347673	F-statistic		3.098305
Durbin-Watson stat	0.558142	Prob(F-statistic)		0.110787

Lampiran 4

Tahun	TPD	fpd- subsidi	PAD	blnj rutin	Tabungan	belanja pemb	DOF	b
1993	31074537938	6770922768	4170725531	19211424212	11945802367	13526825673	0.615975942	24303615170
1994	35226613662	10251552302	5830974130	22243323001	13171380430	12215295371	0.568789385	24975061359
1995	40364309697	13137567798	7235909951	27051216687	14659730583	13175075726	0.550780027	27226741899
1996	41544901861	16188649142	8561635068	29955326931	16280090029	11691503479	0.528866553	25356252719
1997	43746501770	18775356332	10312981013	31526378183	17248978149	13963337733	0.549282838	24971145438
1998	44055097437	17468737024	9411869756	33025987645	14442749379	14957207551	0.538783642	26586360413
1999	49501972709	24149706259	12794926585	34259878381	1989827878	11435032873	0.529817069	25352266450
2000	57732878212	30540791730	15572350502	35055632589	25485159141	12003930260	0.509886929	27192086482
2001	3.40E+11	1.95368E+11	37615518829	2.08E+11	1.38E+11	1.16E+11	0.192537067	1.45E+11
2002	3.38E+11	1.93304E+11	37785100000	1.19E+11	2.45E+11	1.38E+11	0.195469587	1.45E+11

TPE	PDRB	Tahun
0.03966	763818.37	1992
0.093	794113.12	1993
0.09848	867969.01	1994
0.09556	953450.92	1995
0.13323	1044558.69	1996
-0.0248	1183721.31	1997
-0.0165	1154365.53	1998
0.16511	1135287.66	1999
0.03388	1322733.55	2000
0.0797	1367550.25	2001
	1476544.01	2002

**Data desentralisasi fiskal Kota Pekanbaru
Tahun Anggaran 1993-2002**

tahun	pad	ppd	b	tpd
1993	4170725531	2600197237	24303615170	31074537938
1994	5830974130	4420578172	24975061359	35226613662
1995	7235909951	5901657848	27226741899	40364309697
1996	8561635068	7627014073	25356252719	41544901861
1997	10312981013	8462375318	24971145438	43746501770
1998	9411869756	8056867267	26586360413	44055097437
1999	12794926585	11354779673	25352266450	49501972709
2000	15572350502	14968441228	27192086482	57732878212
2001	37615518829	1.58E+11	1.45E+11	3.40E+11
2002	37785100000	1.56E+11	1.45E+11	3.38E+11

Data ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat

tahun	tpd	ppd	pad	(pad+ppd)/tpd
1993	31074537938	2600197237	4170725531	0.217892951
1994	35226613662	4420578172	5830974130	0.291017252
1995	40364309697	5901657848	7235909951	0.325474854
1996	41544901861	7627014073	8561635068	0.389666323
1997	43746501770	8462375318	10312981013	0.429185319
1998	44055097437	8056867267	9411869756	0.396520222
1999	49501972709	11354779673	12794926585	0.487853411
2000	57732878212	14968441228	15572350502	0.529001717
2001	3.40E+11	1.58E+11	37615518829	0.574598682
2002	3.38E+11	1.56E+11	37785100000	0.572001245

Lampiran 6

Derajat Desentralisasi Fiskal

tahun	pad/tpd(%)	ppd/tpd(%)	bantuan/TPD
1993	13.42168157	8.367613518	78.21070491
1994	16.55275238	12.54897282	70.89827481
1995	17.92650489	14.6209805	67.45251462
1996	20.6081485	18.35848379	61.03336771
1997	23.57441303	19.3441189	57.08146807
1998	21.36386095	18.28816127	60.34797778
1999	25.84730645	22.93803469	51.21465886
2000	26.97310611	25.92706564	47.09982825
2001	11.06315446	46.39671371	42.54013183
2002	11.18088472	46.01923977	42.79987551



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS EKONOMI

Condong Catur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55283
Telepon (0274) 881546 - 885376 - 884019 - Fax. : 882589

Nomor : 146 /DEK/10/Bag.Um/IV2004
Hal : PERMOHONAN IJIN PENELITIAN

07 April 2004

Kepada Yth.
BPS Pekanbaru
di Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa mahasiswa sebelum mengakhiri pendidikan di Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta diwajibkan membuat karya ilmiah berupa Riset Penelitian. Sehubungan dengan hal itu mahasiswa kami :

Nama : Betri Maulida
No. Mahasiswa : 00313132
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Alamat : Jl. Tambak Bayan III No. 13 Babarsari Yogyakarta

Bermaksud mohon keterangan / data pada instansi / perusahaan yang Saudara pimpin untuk keperluan menyusun skripsi dengan judul : ANALISIS PERIMBANGAN PEMBIAYAAN PUSAT DAN DAERAH DI KOTA PEKANBARU.

Dosen Pembimbing : Drs. Unggul Priyadi, M.Si

Hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan keilmuan dan tidak disajikan kepada pihak luar. Oleh karena itu kami mohon perkenan Saudara untuk dapat memberikan data/keterangan yang diperlukan oleh mahasiswa tersebut.

Atas perkenan dan bantuan Saudara , kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan,

Drs. Suwarsono Muhammad, MA
NIK . 82. 048



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(BAPEDA)

Kepatihan Danurejan Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, 562811 (Psw. : 209 - 217, 243 - 247) Fax. : (0274) 586712

Nomor : 070/1891
Hal : Ijin Penelitian

Yogyakarta, 12 April 2004
Kepada Yth. :
Gubernur RIAU
di
PEKANBARU

Menunjuk Surat :

Dari : Dekan FE - UII Yogyakarta
No. : 145/DEK/10/Bag.Um/IV/2004
Tanggal : 07 April 2004
Perihal : Ijin Penelitian

Setelah mempelajari rencana penelitian/proyek statement/research design yang diajukan oleh peneliti/surveyor, maka dapat diberikan surat keterangan kepada :

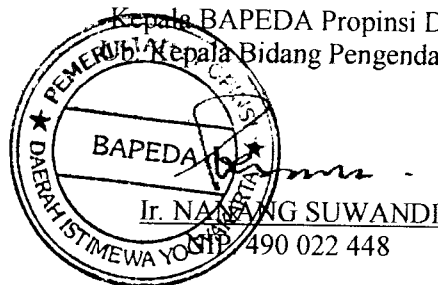
Nama : BETRI MAULIDA
No. Mhs. : 00313132
Alamat Instansi : Condong Catur, Depok, Sleman, Yogyakarta

Judul Penelitian : ANALISIS PERIMBANGAN PEMBIAYAAN FISKAL PEMERINTAH
PUSAT DAN DAERAH 1992/1993 - 2002/2003 STUDI KASUS KOTA
PEKANBARU

Lokasi : Propinsi Riau

Peneliti berkewajiban menghormati/mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.
Kemudian harap menjadikan maklum.

An. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Kepala BAPEDA Propinsi DIY
Kepala Bidang Pengendalian



Tembusan Kepada Yth.:

1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Dekan FE - UII Yogyakarta;
3. Yang bersangkutan;
4. Peringgal.



PRMERINTAH PROPINSI RIAU
BADAN INFORMASI, KOMUNIKASI DAN KESATUAN BANGSA

Jl. Cut Nyak Dien II/2 Telp. (0761) 23740, 38736 Fax. 38736

PEKANBARU - RIAU

Kode Pos : 28126

REKOMENDASI

NO. : 070/BIKKB/ 579 /2004

Tentang

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Dengan hormat,

Kepala Badan Informasi, Komunikasi dan Kesatuan Bangsa Propinsi Riau, setelah membaca surat Permohonan Riset / Pra Riset Rektor ~~Universitas Riau~~ Kepala Bapeda Prov. DIY Ub. Kabid Pengendalian

Nomor : 070/571 Tanggal 12 April 2004 .

Sehubungan dengan ini memberi Rekomendasi kepada :

Nama : **BESTRI MAULIDA**

Nomor Nmh : **00313132**

Fakultas /Jur: **Ekonomi Pembangunan**

Alamat : **Mhs Univ. Islam Indonesia Yogyakarta .**

Judul Skripsi : **" ANALISIS PERIMBANGAN PEMBIAYAAN FISKAL PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH 1992, 1993 - 2002/2003 STUDI KASUS KOTA PEKANBARU . "**

Jntuk melakukan penelitian di : **Dispenda Kota**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.

Demikian Rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya, dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini, dan terimakasih.

DIBUAT DI : PEKANBARU

PADA TANGGAL : 19 April 2004 .-

An. KEPALA BADAN INFORMASI, KOMINIKASI DAN

KEKASATUAN BANGSA PROPINSI RIAU
KABID PEMERINTAHAN PERENCANAAN STRATEGIS
LI
DAN
G
DRE. H. KAZAHIDIN AKHMAD)
NIP. 1 010102908 .-

Rekomendasi ini disampaikan
Kepada Yth :

1. Walikota Pekanbaru up. Kaban -
Kesbang di Pekanbaru
2. Ka. Bapeda Up. Kabid Pengendalian
Prov. Yogyakarta .
3. yang bersangkutan
4. a r s i p .-



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
KANTOR KESATUAN BANGSA

Jalan Mustafasari No. 1 Telp. (0761) 35071 - Pekanbaru

Pekanbaru, 20 April 2004.-

Kepada Yth :

Nomor : 247 /Kesbang/IR- IV / 04.
Lampiran :
Perihal : IZIN RISET / PENELITIAN

Sdr. Kadispenda Kota Pekanbaru
di -

P e k a n b a r u

Dengan hormat,

Memenuhi maksud Surat: Kepala Badan Informasi, Komunikasi dan Kesbang Propinsi Riau Nomor : 070/BIKKB/579/2004. Tanggal, 19 April 2004.

Perihal tersebut pada pokok surat diatas, akan datang menghadap Saudara :

Nama / No.Mhs : BETRI MAULIDA / 00313132

Fakultas : Ekonomi UII

Alamat : Jl. Thamrin No. 127 Gobah

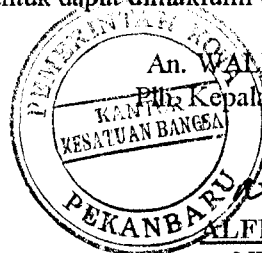
Bermaksud melakukan penelitian dalam Wilayah / Kantor Saudara, guna mendapatkan dan mengumpulkan data yang diperlukan dalam izin pengumpulan data / informasi rencana penelitian dengan judul :

" Analisis Perimbangan Pembiayaan Fiskal Pemerintah Pusat Dan Daerah - 1993 - 2002/2003 Studi Kasus Kota Pekanbaru "

Untuk maksud tersebut kiranya Saudara dapat memberikan bantuan yang diperlukan sepanjang yang bersangkutan dapat memenuhi ketentuan / peraturan yang berlaku semata-mata untuk kepentingan Ilmiah.

Adapun penelitian ini berlangsung mulai sejak tanggal surat ini dikeluarkan hingga selesai.

Demikian kami sampaikan untuk dapat dimaklumi dan bantuan sepenuhnya.



An. WALIKOTA PEKANBARU
Kepala Kantor Kesatuan Bangsa

ALFIANDRY, S.Sos
NIP.010227970

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sp. Walikota Pekanbaru di Pekanbaru sebagai Laporan
2. Sdr. Dekan Fak. Ekonomi UII di Yogyakarta
3. Yang bersangkutan
4. A r s i p .-